

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAYA SAING
GLOBAL USAHA KECIL MENENGAH (UKM) di
KOTA BATU MENGGUNAKAN *SME DEVELOPMENT***

INDEX

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Xandra Debora Beselly

NIM. 135030301111013



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

MINAT BISNIS INTERNASIONAL

MALANG

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan ridho dan tuntunan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kebijakan Pengembangan Daya Saing Global Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Batu Menggunakan *SME Development Index*”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang digunakan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang terhormat:

1. Mama Lily Riwayatningsih selaku Ibu dari penulis, Papa Alm. Bambang selaku Bapak dari penulis, Kakak Sebrian Beselly dan Siska Beselly selaku kakak dari penulis dan seluruh keluarga besar yang sudah senantiasa mendoakan, memotivasi, serta mendukung penulis hingga sekarang.
2. Bapak Prof. Dr Bambang Supriyono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Wilopo, MAB, selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Mukhammad Kholid Mawardi, S.Sos, M.AB, Ph.D selaku pembimbing skripsi penulis di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang senantiasa memberikan penulis bimbingan serta arahan.
5. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieq, MBA, selaku Ketua Minat khusus Bisnis Internasional di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak Rahman Safi'i selaku Kepala Bidang UKM dan Perindustrian Kota Batu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam wawancara, serta membimbing penulis selama penelitian skripsi.
8. Bapak Herwindra Danang selaku Kepala Seksi Bina Usaha Dan Perlindungan Bidang Industri Kota Batu yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis dalam wawancara, serta membimbing penulis selama melakukan penelitian skripsi.

9. Magda Rista, Reftamia, Pramesti Citra, Christa Dias, dan Ary Firmansyah selaku sahabat yang telah mendampingi penulis pula untuk memberikan semangat, menemani penulis dan kekuatan dalam mengerjakan skripsi.
10. Wulan Deasy dan Nugrahanti Khairani yang telah meluangkan waktu, pikiran, masukan, dan saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. Bidadari Madam Clarissa, Nuris, Ajizah, Khartyka, Leoni, Sarah, Asti, Imeyla, Septi, Mechelin, Betadio, Finsza, dan teman-teman seperjuangan, terutama BINTER 2013 yang telah memberikan kebahagiaan dan kekuatan penulis dalam mengerjakan skripsi.
12. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian penulisan laporan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Malang, 15 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSEMBAHAN	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kontribusi Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Usaha Kecil Menengah (UKM)	17
1. Pengertian Usaha Kecil Menengah	17
2. Usaha Kecil Menengah Dalam Perekonomian	19
3. Daya Saing Usaha Kecil Menengah.....	20



	4. Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	21
	C. Bisnis Internasional	24
	D. Pemasaran Internasional.....	25
	E. Ekspor.....	26
	F. <i>SME Development Index</i>	28
	G. <i>SME Development Index</i> Sebagai Indikator yang Mengukur Peran Pemerintah dalam Pengembangan UKM	35
BAB III	METODE PENELITIAN	37
	A. Jenis Penelitian.....	37
	B. Fokus Penelitian	38
	C. Lokasi Penelitian	39
	D. Sumber Data.....	40
	E. Teknik Pengumpulan Data	41
	F. Instrumen Penelitian	43
	G. Metode Analisis Data.....	44
	H. Keabsahan Data.....	46
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	49
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
	1. Kota Batu.....	49
	a) Profil Kota Batu	49
	b) Visi dan Misi	52
	c) Logo Kota Batu.....	53
	2. Usaha Kecil Menengah (UKM) Berorientasi Ekspor	54
	B. Penyajian Data.....	58
	1. Kontribusi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berorientasi Ekspor Terhadap Ekonomi Lokal di Kota	

Batu	58
a. Perkembangan UKM Berorientasi Ekspor di Kota Batu ...	60
b. Kontribusi UKM Berorientasi Ekspor bagi Perekonomian Kota Batu.....	63
2. Implementasi Kebijakan Pengembangan Daya Saing Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Batu dalam Mengembangkan Daya Saing Global	64
3. Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah Tentang Kebijakan Pengembangan Daya Saing UKM di Kota Batu Pada Pasar Global.....	85
C. Analisis dan Interpretasi Data	94
1. Kontribusi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berorientasi Ekspor Terhadap Ekonomi Lokal di Kota Batu	96
2. Implementasi Kebijakan Pengembangan Daya Saing Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Batu Dalam Mengembangkan Daya Saing Global	102
3. Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah Tentang Kebijakan Pengembangan Daya Saing UKM di Kota Batu Pada Pasar Global.....	112
BAB V	
PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN.....	126



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 2.1.	<i>Mapping</i> Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2.2.	Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil Menengah menurut UU no. 20 Tahun 2008	22
Tabel 2.3.	Pengertian Bisnis Internasional Menurut Para Ahli	24
Tabel 2.4.	Kelebihan dan Kekurangan Ekspor Langsung dan Tidak Langsung....	28
Tabel 4.1.	Data Pertumbuhan UMKM Kota Batu Tahun 2009-2016	56
Tabel 4.2.	Data Usaha Kecil Menengah Berorientasi Ekspor	57
Tabel 4.3.	Perkembangan UKM Berorientasi Ekspor	62
Tabel 4.4.	Perkembangan UKM Berorientasi Ekspor di Kota Batu	98
Tabel 4.5.	Jumlah Tenaga Kerja di Kota Batu 2013-2015	99
Tabel 4.6.	Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batu 2013-2015	100
Tabel 4.7.	Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2013-2015	101
Tabel 4.8.	<i>SME Development Index</i> Kota Batu	103
Tabel 4.9.	Hasil Angket Pelaku UKM di Kota Batu	112

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 2.1.	Kerangka Indeks Kebijakan Perkembangan UKM dan Siklus Hidup.....	30
Gambar 3.1	Analisis Data Model Interaktif	46
Gambar 3.2.	Tringulasi Teknik	48
Gambar 4.1.	Peta Kota Batu	50
Gambar 4.2.	Logo <i>Shinning</i> Batu	53
Gambar 4.3.	Pusat Layanan Usaha Terpadu Kota Batu.....	70
Gambar 4.4.	Jadwal Layanan Konsultasi	71
Gambar 4.5.	Pelatihan Kewirausahaan Pemerintah Kota Batu	76
Gambar 4.6.	Angket Bagian 1 : Kerangka Kelembagaan.....	79
Gambar 4.7.	Angket Bagian 2 : Layanan Dukungan.....	79
Gambar 4.8.	Angket Bagian 3 : Layanan Murah dan Cepat bagi Pelaku <i>Start-up</i> Serta Perbaikan Regulasi	80
Gambar 4.9.	Angket Bagian 4 : Akses Keuangan.....	81
Gambar 4.10.	Angket Bagian 5 : Teknologi dan Transfer Teknologi	82
Gambar 4.11.	Angket Bagian 6 : Ekspansi Pasar Internasional.....	83
Gambar 4.12.	Angket Bagian 7 : Pelatihan Kewirausahaan	84
Gambar 4.13.	Angket Bagian 8 : Efektifitas Asosiasi Bagi UKM	85
Gambar 4.14.	Angket Pelaku UKM Kota Batu	95

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
Lampiran 1	: Wawancara dengan DISKOPERINDAG Kota Batu	124
Lampiran 2	: Wawancara dan Memberikan Angket kepada UKM di Kota Batu	124



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia semakin meningkat di tengah persaingan menghadapi perusahaan lokal maupun internasional. Meningkatnya UKM dalam dunia bisnis memperlihatkan bahwa UKM mampu mempertahankan bisnisnya dalam persaingan usaha. Usaha Kecil Menengah menurut Kementerian Keuangan RI (2015) juga mampu bertahan pada krisis ekonomi tahun 1998, di mana perusahaan-perusahaan besar bangkrut satu persatu. Meningkatnya perkembangan UKM pada krisis ekonomi mendorong pemerintah untuk memberdayakan UKM.

Pengembangan UKM digencarkan oleh Pemerintah Indonesia karena sektor ini mampu membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setiap tahunnya (Kementerian Keuangan RI, 2015). Pengembangan UKM juga dilakukan untuk menghadapi tingginya persaingan di arus globalisasi sehingga UKM harus mampu menghadapi tantangan global. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang semakin membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia,

mengingat UKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011).

Produk-produk asing yang membanjiri Negara Indonesia diakibatkan karena adanya perdagangan bebas. Perdagangan bebas mengisyaratkan bahwa dibebaskannya bea masuk impor dari negara-negara anggota komunitas regional. Segala akses perdagangan akan dibebaskan dari hambatan pajak pemerintah negara tersebut. Adanya perdagangan bebas membuat ekonomi sebuah negara melemah karena banyaknya produk impor yang masuk.

Negara Indonesia juga mengalami gejolak akibat adanya perdagangan bebas. Kebebasan perdagangan di negara Indonesia menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah. Sehingga pemerintah Indonesia mendorong pengusaha di segala industri termasuk Usaha Kecil Menengah meningkatkan ekspornya. Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup besar baik secara migas maupun non migas seharusnya mampu menjadikan negara yang unggul secara ekonomi dibandingkan negara lain.

Pemerintah kemudian menerbitkan kebijakan ekonomi untuk mendorong perekonomian Indonesia. Kebijakan tersebut salah satunya ditujukan bagi pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan ini dilakukan pemerintah dengan memberikan fasilitas subsidi bunga dalam pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Kementerian Keuangan RI, 2015).

Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil Menengah yang diterbitkan oleh Pemerintah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi masalah pengangguran di Indonesia. Menurut Tulus Tambunan (2002) seperti yang dikutip oleh Choirul Djahhari (2004: 522), “Di Indonesia kebijakan terhadap UKM lebih sering dikaitkan dengan upaya pemerintah mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Kebijakan pengembangan UKM di Indonesia masih berorientasi pada perekonomian dan sosial daripada persaingan atau pasar skala Nasional maupun Internasional sehingga kebijakan yang diambil belum terintegrasi dalam kebijakan ekonomi makro.

Potensi UKM bagi Indonesia memang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan serta penyerapan tenaga kerja, namun kendala baik secara internal maupun eksternal masih dialami UKM. Kendala yang berupa masih susahnya UKM dalam menembus pasar internasional, transfer teknologi, dan pelatihan kerja yang rendah sehingga pelaku UKM belum cukup memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Kendala tersebut menjelaskan bahwa UKM di Indonesia masih perlu peningkatan daya saing pada pasar global.

Kontribusi produk UKM di pasar global yang masih rendah mengurangi daya saing mereka sehingga UKM tidak dapat mencapai kapabilitasnya dalam perekonomian negara. Daya saing UKM ini dijadikan acuan dalam menggunakan *SME Development Index* (Indeks Kebijakan Pengembangan

UKM) yang dibutuhkan untuk memfasilitasi UKM di suatu daerah. *SME Development Index* diharapkan agar UKM pada saatnya dapat tumbuh menjadi usaha yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

SME Development Index merupakan cara yang digunakan pemerintah untuk mendorong UKM meningkatkan daya saing mereka di pasar global serta memperkuat pangsa pasarnya. pemerintah dapat melihat negara mana yang sudah maju UKM-nya dan mana yang masih belum dari penggunaan *SME Development Index*. Pemerintah dapat melihat *progress* yang dilakukan oleh negara dengan menggunakan indeks kebijakan pengembangan UKM sebagai acuan.

Salah satu Kota di Indonesia yang memiliki cukup banyak UKM adalah Kota Batu. Mohammad Chori dalam berita Surya (2016) menyebutkan bahwa, “Saat ini di Kota Batu ada 14.570 pegiat UMKM”. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pengusaha UKM mulai meningkat di Kota Batu. Meningkatnya UKM terjadi karena mulai berkembangnya pariwisata di Kota Batu sehingga makin banyak UKM yang bertumbuh. Peningkatan pada sektor usaha UKM membuat Pemerintah Kota Batu berupaya untuk meningkatkan produk ekspor Kota Batu ke pasar global.

Produk UKM di Kota Batu yang beragam sehingga memberikan peluang untuk memasarkan produknya secara ekspor. Produk-produk ekspor dari UKM Kota Batu dapat berupa makanan ringan kripik dari berbagai buah-buahan khas Kota Batu, hasil kerajinan tangan, hasil produk kain batik, dan

sebagainya. UKM Kota Batu yang ingin melakukan ekspor untuk produknya perlu memiliki daya saing yang tinggi untuk menembus pasar global. Daya saing yang dimiliki oleh UKM Kota Batu masih rendah karena produknya yang masih belum banyak memenuhi kriteria untuk memasuki pasar global. Adanya kebijakan pengembangan daya saing UKM dapat memfasilitasi UKM Kota Batu untuk lebih mengetahui kondisi pasar dan mengetahui produk mana yang sesuai dengan pasar global. Sehingga kebijakan pengembangan UKM membantu UKM dalam meningkatkan daya saing usaha yang dimilikinya.

Berdasarkan permasalahan di atas maka dibutuhkan kerjasama dari Pemerintah Kota Batu dengan pengusaha UKM Kota Batu untuk meningkatkan ekspor serta daya saing di pasar global. Adanya kebijakan pengembangan UKM dapat mempermudah pengusaha UKM memperluas pasar, daya saing usaha, dan memberikan peluang bagi UKM untuk mempromosikan produknya. Dari penjelasan tersebut yang peneliti harapkan adalah menggali dan menganalisis secara mendalam terkait kebijakan pengembangan daya saing UKM Kota Batu pada pasar global. Oleh Karena itu, peneliti mengangkat topik berjudul **“Kebijakan Pengembangan Daya Saing Global Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Batu Menggunakan *SME Development Index*”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kontribusi UKM berorientasi ekspor terhadap ekonomi lokal di Kota Batu?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan daya saing UKM di Kota Batu dalam mengembangkan daya saing global?
3. Bagaimana persepsi pelaku Usaha Kecil Menengah tentang kebijakan pengembangan daya saing UKM pada pasar global?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada perumusan masalah di atas, adalah :

1. Mendeskripsikan kontribusi UKM berorientasi ekspor terhadap ekonomi lokal di Kota Batu.
2. Menjelaskan implementasi kebijakan pengembangan daya saing UKM di Kota Batu dalam mengembangkan daya saing global.
3. Mendeskripsikan persepsi pelaku UKM tentang kebijakan pengembangan daya saing UKM di Kota Batu pada pasar global.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dengan adanya penelitian ini, antara lain:

1. Kontribusi Teoritis

Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah adanya penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai wacana untuk penelitian sejenis selanjutnya dan menambah referensi bagi penelitian-penelitian mengenai daya saing bagi UKM di pasar global.

2. Kontribusi Praktis

Kontribusi praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dan masukan bagi UKM berorientasi ekspor dalam mempertimbangkan atau memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan dengan daya saing UKM di pasar global.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai isi skripsi serta memudahkan memahami seluruh materi dari pokok permasalahan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan yang dikelompokkan dalam beberapa, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi penjelasan mengenai latar belakang yang mendasari pemilihan judul, perumusan masalah yang ingin diteliti, tujuan yang ingin dicapai yaitu berusaha untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah dari penelitian tersebut, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan dari penelitian. Latar belakang yang menjadi dasar penelitian bertitik tolak dari bagaimana kebijakan pengembangan daya saing UKM pada pasar global. Oleh sebab itu, dibutuhkan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari kajian kepustakaan konseptual yang terdiri dari teori-teori konsep, yaitu teori yang berhubungan dengan

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), bisnis internasional, pemasaran internasional, cara memasuki pasar internasional melalui ekspor langsung dan tidak langsung, daya saing UKM, *SME Development index*, dan peran *SME Development index* bagi UKM dalam meningkatkan daya saing global serta dipaparkan dengan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan kebijakan pengembangan daya saing UKM.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menerangkan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data utama penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan pihak Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Batu. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta secara tidak langsung mengenai studi pustaka dengan masalah yang diteliti. Analisis data yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum perusahaan dan hasil penelitian yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian, baik berupa wawancara, data tabel, hasil pengamatan, dan dokumentasi yang diperoleh selama melakukan penelitian. Dari hasil metode penelitian yang digunakan maka dalam bab ini akan melihat kontribusi UKM berorientasi ekspor terhadap ekonomi lokal Kota Batu sehingga dapat melihat bagaimana daya saing serta pengembangan UKM di Kota Batu. Besarnya Kontribusi UKM Pemerintah membuat Kebijakan untuk pengembangan daya saing global UKM di Kota Batu. Adanya kebijakan pengembangan daya saing global UKM di Kota Batu memberikan persepsi bagi pelaku UKM Kota Batu untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan terhadap ekonomi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran yang dikemukakan dalam bab ini diperoleh dari hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya pada bab empat. Adapun maksud dari bab ini agar dapat dipergunakan sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama Pemerintah Kota Batu yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan serta Pelaku UKM

Kota Batu sebagai objek penelitian dalam kebijakan pengembangan daya saing global UKM di Kota Batu dengan menggunakan *SME Development Index*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bahan perbandingan bagi peneliti dalam melakukan penelitian dan menganalisis persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Tambunan (2008)

“SME Development In Indonesia: Do Economic Growth And Government Supports Matter?”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah apakah Usaha Kecil Menengah (UKM) akan bertahan dalam proses perkembangan ekonomi atau terutama fitur transisi dari perekonomian Indonesia, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bergantung pada bantuan pemerintah untuk tumbuh.

Penelitian ini menguji isu-isu dengan data Indonesia. Sebagai sarana untuk mengatasi isu-isu tersebut, menggunakan model regresi sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa kedua produk yang nyata domestik bruto (PDB) per kapita dan pengeluaran pembangunan pemerintah (di mana bagian dari itu digunakan untuk membiayai UKM program promosi pembangunan) memiliki korelasi positif dengan pangsa UKM dalam PDB.

Penelitian ini berpendapat bahwa UKM di Negara-negara berkembang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan bahkan tumbuh dalam jangka panjang karena tiga alasan utama: (a) mereka memiliki ceruk pasar untuk diri mereka sendiri; (b) perusahaan ini bertindak sebagai 'terakhir' bagi masyarakat miskin; dan (c) keterkaitan produksi antara UKM dan perusahaan besar dalam bentuk subkontrak menjadi semakin penting, dan dengan demikian, mereka akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan perusahaan besar.

2. Dewanti (2010)

“Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro : Kendala Dan Alternatif Solusinya”. Penelitian ini bertujuan agar UKM semakin meningkat, diwujudkan dengan berbagai program pemberdayaan. Program pemberdayaan untuk meningkatkan kemajuan dan kemandirian UKM. Program-program ini dalam bentuk modal, pelatihan, dan juga pameran. Semua program ini dapat memberikan dampak positif bagi UKM untuk mengatasi beberapa kesulitan yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini kemudian ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian adalah program pemberdayaan masih memenuhi kendala sehingga kurang efektif. Kendala yang dihadapi misalnya dalam bentuk waktu, sumber daya, sikap, jaringan dan informasi. Variabel dalam kenyataannya selain menjadi kendala juga menjadi potensi

untuk merampingkan program pemberdayaan UKM. Hal ini karena masing-masing UKM memiliki keterbatasan juga kesempatan yang berbeda.

3. Mauregen (2012)

“Promoting SME development in Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang mengidentifikasi cara-cara untuk memastikan bahwa perusahaan kecil memberikan kontribusi maksimal mereka untuk penciptaan pekerjaan dan produktivitas untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Dimulai dengan menggambarkan karakteristik utama dari perusahaan kecil di Indonesia, serta peran mereka dalam mendukung perekonomian krisis global selama 2008-2009.

Penelitian ini kemudian memeriksa cara untuk meningkatkan produktivitas mereka dalam jangka menengah dengan mendorong mereka untuk meresmikan dan berinvestasi. Kemudian penelitian ini melihat perubahan kebijakan yang dapat membantu untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sebelum meninjau dukungan kebijakan. Penelitian ini menghasilkan (1) Mengurangi birokrasi melalui penyederhanaan. Proses perizinan dan biaya kepatuhan pajak yang lebih rendah akan membantu. Menghindari kenaikan berlebihan dalam upah minimum provinsi pada tingkat yang wajar. (2) Meningkatkan investasi. Mengklarifikasi hak milik untuk real estate, dan membuat informasi yang dikumpulkan oleh biro kredit yang tersedia untuk semua lembaga keuangan akan mempermudah akses untuk membiayai. Pada saat yang sama, pengembangan alternatif pembiayaan seperti modal ventura, leasing atau

pembiayaan mikro akan meningkatkan pasokan kredit. (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kurangnya pekerja yang terampil di Negara Indonesia, maka adanya kebijakan bertujuan baik untuk meningkatkan kolam pekerja dan membuat lembaga pendidikan dan pelatihan yang lebih responsif terhadap berkembang permintaan pasar tenaga kerja. Indonesia memiliki tradisi panjang mendukung UMKM. Tapi tanggung jawab antara tingkat pemerintahan daerah dan pemerintah pusat perlu diperjelas untuk meminimalkan tumpang tindih dan ketidak efisien. Adapun penyajian penelitian terdahulu melalui Tabel 2.1 berdasarkan narasi di atas:



Tabel 2.1. *Mapping Penelitian Terdahulu*

No.	Tahun	Nama Peneliti dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil penelitian
1.	2008	Tambunan, Tulus. “ <i>SME Development In Indonesia: Do Economic Growth And Government Supports Matter?</i> ”.	a. Apakah Usaha Kecil Menengah (UKM) akan bertahan dalam proses perkembangan ekonomi atau terutama fitur transisi dari perekonomian Indonesia b. Usaha Kecil Menengah (UKM) bergantung pada bantuan pemerintah untuk tumbuh?	Metode penelitian ini menggunakan model regresi sederhana.	Terdapat tiga alasan utama UKM di Negara-negara berkembang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan bahkan tumbuh dalam jangka panjang karena: (a) mereka memiliki ceruk pasar untuk diri mereka sendiri; (b) perusahaan bertindak sebagai 'terakhir' bagi masyarakat miskin; dan (c) keterkaitan produksi antara UKM dan perusahaan besar dalam bentuk subkontrak menjadi semakin penting.
2.	2010	Dewanti, Ida Susi. “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro : Kendala dan Alternatif Solusinya”.	Penelitian ini bertujuan agar UKM semakin meningkat, diwujudkan dengan berbagai program pemberdayaan. Program pemberdayaan untuk	Metode deskriptif analisis dengan cara mendeskripsikan data-data yang diperoleh.	Hasil penelitian yang didapat adalah program pemberdayaan masih memenuhi kendala sehingga kurang efektif.

			meningkatkan kemajuan dan kemandirian UKM.		Kendala yang dihadapi misalnya dalam bentuk waktu, sumber daya, sikap, jaringan dan informasi. Variabel dalam kenyataannya selain menjadi kendala juga menjadi potensi untuk merampingkan program pemberdayaan UKM.
3.	2012	Mourougane, Annabelle. <i>"Promoting SME development in Indonesia"</i>	<p>a. Mengidentifikasi cara-cara untuk memastikan bahwa perusahaan kecil memberikan kontribusi maksimal.</p> <p>b. Memeriksa cara untuk meningkatkan produktivitas mereka dalam jangka menengah.</p> <p>c. Melihat perubahan kebijakan yang dapat membantu untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sebelum meninjau dukungan kebijakan.</p>	Analisis deskriptif	Hasil penelitian yang didapat adalah dengan mengurangi birokrasi melalui penyederhanaan, meningkatkan investasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

B. Usaha Kecil Menengah (UKM)

Seiring dengan perkembangan usaha maka bentuk dan ukuran usaha juga akan berubah, mulai dari usaha kecil menjadi menengah hingga usaha berskala besar. Perkembangan usaha tersebut menciptakan kelompok usaha yang memiliki pengaruh besar bagi perekonomian sebuah negara. Usaha ini dikenal dengan Usaha Kecil Menengah (UKM).

1. Pengertian Usaha Kecil Menengah

Usaha kecil dan menengah memiliki pengertian yang berbeda-beda oleh berbagai sumber. Pengertian UKM didasarkan pada besarnya hasil/pendapatan usaha, besarnya modal, jumlah tenaga kerja hingga bentuk usaha (Agustina, 2015:4). Menurut UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah No. 20 Tahun 2008, pengertian UKM dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria usaha mikro adalah Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan/atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha besar yang memenuhi



kriteria Usaha Kecil. Kriteria usaha kecil adalah Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan/atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- c. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan. Kriteria usaha menengah adalah Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan/atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai

dengan 99 orang. Sedangkan menurut Bank Indonesia, UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa modalnya kurang dari Rp. 20 juta; untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta; memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan; dan omzet tahunan \leq Rp 1 miliar.

Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa sumber, maka dapat disimpulkan Usaha Kecil Menengah merupakan usaha ekonomi produktif milik orang perorang yang berupa usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan/omzet pelaku UKM.

2. Peran Usaha Kecil Menengah dalam Perekonomian

Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian baik di negara-negara maju maupun negara berkembang. Usaha Kecil Menengah (UKM) memberi kontribusi yang positif terhadap penanggulangan masalah-masalah ekonomi dan sosial, berupa tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, serta masalah urbanisasi (Agustina, 2015:6). Adanya kontribusi ini membuat Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat memberikan kekuatan ekonomi bagi sebuah negara.

Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam perekonomian menurut Bank Indonesia (2009) dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sumber pendorong pertumbuhan ekspor nonmigas.

- b. Unit usaha pendukung bagi usaha besar dengan menyediakan bahan-bahan tertentu.
- c. Usaha kecil menengah sebagai penopang perekonomian
- d. Usaha kecil menengah menciptakan tenaga kerja serta lapangan kerja bagi masyarakat.

Dari peran tersebut maka secara umum bisa dilihat bahwa UKM memiliki peranan dalam memajukan perekonomian suatu daerah dan akhirnya akan memajukan perekonomian secara nasional. Adanya UKM membantu Pemerintah dalam menangani permasalahan ekonomi seperti, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta membantu mendukung kebutuhan usaha besar. Berkembangnya UKM meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, maka akan terjadi jaminan pekerjaan serta tenaga kerja menerima dan memiliki pendapatan yang tetap dan semakin meningkat.

3. Daya Saing Usaha Kecil Menengah

Adanya pemberdayaan UKM dalam menompang perekonomian nasional tidak terlepas dari strategi pemasaran yang tepat dari pengusaha UKM. Strategi pemasaran tersebut berguna untuk memenangkan persaingan dalam usaha. Memaknai strategi untuk daya saing penting untuk keberhasilan bisnis. Menurut Craves (2000) dalam Bangsawan (2015:30) mengatakan bahwa memahami strategi bisnis dan keunggulan bersaing sangatlah penting untuk mengembangkan strategi pemasaran. Sehingga

keunggulan daya saing sebuah usaha berperan besar dalam mengembangkan pemasaran UKM Indonesia dikancah internasional.

Daya daing UKM Indonesia relatif rendah walaupun usaha ini mendominasi usaha-usaha yang ada di Indonesia. Rendahnya daya saing ini menjelaskan kenapa intensitas ekspor UKM Indonesia rendah. Di pasar domestik produk buatan dalam negeri masih kalah bersaing dengan produk impor. Beberapa alasan produk dalam negeri kalah bersaing sebagai berikut: kualitas barang rendah karena rendahnya teknologi yang digunakan UKM, tingkat efisiensi produksi yang rendah, dan kebijakan ekonomi makro Indonesia sehingga mengurangi UKM dalam meningkatkan kualitas produknya. Alasan-alasan tersebut mengurangi daya saing UKM Indonesia dengan usaha lainnya.

Melakukan inovasi merupakan cara efektif dalam meningkatkan serta mempertahankan daya saing. Inovasi yang dilakukan secara terus-menerus penting untuk meningkatkan kualitas produk serta menghasilkan produk-produk baru mengikuti perubahan selera pasar (Tambunan, 2012:70). Selain itu, tingkat efesiensi proses produksi juga menentukan tingkat daya saing. Sehinga adanya kemampuan inovasi UKM yang baik dapat meningkatkan daya saing UKM tersebut dalam pertempuran dengan produk impor.

4. Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak terlepas dari dukungan Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara. Dukungan pemerintah ini diwujudkan dengan adanya kebijakan

pengembangan UKM. Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan UKM bertujuan untuk meningkatkan potensi UKM dalam pembangunan nasional serta meningkatkan kiprahnya dalam perdagangan internasional.

Pemerintah dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah berperan sebagai fasilitator. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, Pemerintah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain dan teknologi. Pemerintah juga memfasilitasi dunia usaha dan masyarakat yang berperan serta secara aktif melakukan pengembangan UKM.

Kebijakan pengembangan Usaha Kecil Menengah bertujuan agar mempermudah dan memperlancar para pengusaha UKM untuk mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan bidang usaha, sehingga adanya kontribusi pemerintah dalam kebijakan pengembangan usaha dapat meningkatkan daya saing Usaha Kecil Menengah secara global. Adapun kebijakan pengembangan usaha dijelaskan lebih lanjut pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil Menengah menurut UU no. 20 Tahun 2008

No	Bidang Usaha	Kebijakan Pengembangan Usaha
1.	Produksi dan Pengolahan	a. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM; b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM; c. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan

		d.Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.
2.	Pemasaran	<p>a.Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;</p> <p>b.Menyebarluaskan informasi pasar;</p> <p>c.Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;</p> <p>d.Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi UMK;</p> <p>e.Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan</p> <p>f. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.</p>
3.	Sumber Daya Manusia	<p>a.Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;</p> <p>b.Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan</p> <p>c.Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.</p>
4.	Desain dan Teknologi	<p>a.Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;</p> <p>b.Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;</p> <p>c.Meningkatkan kemampuan UKM di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; memberikan insentif kepada UMKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan</p> <p>d.Mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.</p>

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016)

C. Bisnis Internasional

Bisnis internasional merupakan suatu kegiatan bisnis yang aktivitasnya berlangsung antara satu negara dengan negara lain guna memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan oleh negara itu sendiri. Kegiatan bisnis internasional sangat penting bagi suatu negara selain memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri, kegiatan bisnis ini juga dapat meningkatkan pendapatan negara tersebut. Adapun pengertian bisnis internasional menurut para ahli yang disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Pengertian Bisnis Internasional Menurut Para ahli

No.	Author	Pengertian
1.	Ajami, Riad A, Karel Cool, G. Jason, dan Dara Khambata (2006:4)	<i>International business is described as any business activity crosses national boundaries. The entities involved in business can be private, governmental, or a mixture of the two.</i>
2.	Ball, Donald A, J. Michael Geringer, Michael S. Minor, dan Jeanne M. Mcnett (2014:11)	Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melewati batas negara, kegiatan ini tidak hanya meliputi perdagangan internasional dan perusahaan manufaktur di luar negeri tetapi juga industry jasa yang berkembang dibidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, periklanan, kontruksi, ritel, dan komunikasi massa.
3.	Hill, Charles W.L (2008)	Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional.
4.	Katsioloudes, Marios I dan Spyros Hadjidakis (2007:9)	<i>International business is all commercial transactions—private and governmental—between two or more countries.</i>

Sumber : Data diolah

Berdasarkan beberapa pengertian bisnis internasional menurut para ahli di atas, maka kesimpulan dari bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang melewati batas-batas negara antara dua negara atau lebih yang aktivitasnya dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan maupun pemerintahan.

Bisnis internasional dapat melakukan transaksi bisnis lebih dari dua negara, yang mana transaksi ini tidak hanya perusahaan multinasional tetapi UKM (Usaha Kecil Menengah) juga dapat terlibat. Perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya menggunakan aktivitas bisnis dari yang sederhana hingga tahap yang kompleks dan berisiko tinggi. Aktivitas bisnis internasional dapat berupa ekspor-impor, FDI (*Foreign Direct Investment*), Lisensi, serta *Franchising*.

D. Pemasaran Internasional

Pemasaran merupakan salah satu prosedur penting dalam mengenalkan serta memasarkan produk perusahaan kepada konsumen. Pemasaran tidak hanya sebatas penjualan dan periklanan melainkan harus dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan kepuasan konsumen. Pemasaran dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan mencapai sasaran perusahaan, dilakukan dengan cara mengantisipasi kebutuhan pelanggan serta mengarahkan aliran barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari produsen (Cannon, 2008:8).

Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan

mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen atau para pemakai di lebih satu bangsa untuk mendapat keuntungan (Cateora dan Graham, 2002:7). Pemasaran Internasional menurut Jain (2001:15) merupakan pemasaran yang mengacu pada pertukaran melintasi batas-batas negara untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran Internasional dapat diartikan bahwa kegiatan pemasaran produk yang melintasi batas negara untuk memenuhi kebutuhan negara lain serta untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.

Sebuah perusahaan yang memutuskan memperluas pasar secara internasional, perusahaan tersebut harus menentukan jenis pemasaran internasional yang akan digunakan. Jenis-jenis pemasaran internasional yang dapat digunakan perusahaan menurut Kotabe dan Helsen (2004:8), yaitu pemasaran ekspor, internasional, multinasional, dan global. Pemasaran ekspor merupakan jenis pemasaran internasional yang sering digunakan oleh perusahaan karena kegiatan pemasaran yang langsung mengirimkan produk-produk tersebut secara fisik ke negara lain. Pelaku usaha yang ingin melebarkan usahanya dengan melakukan pemasaran internasional maka pelaku usaha dapat memilih jenis yang digunakan, yaitu jenis pemasaran ekspor, pemasaran multinasional, dan pemasaran global.

E. Ekspor

Ekspor merupakan bagian yang sangat penting bagi perekonomian negara. Kegiatan ekspor meningkatkan devisa yang diperlukan untuk pengembangan suatu negara. Ekspor adalah menjual barang dari dalam negeri ke luar

peredaran Republik Indonesia dan barang yang dijual tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan (Hamdani,2012:37). Beberapa pendapat dari para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ekspor adalah suatu kegiatan bisnis yang menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri.

Ekspor merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memasuki pasar internasional, dalam mengekspor perusahaan biasanya memulai dengan melakukan ekspor tidak langsung kemudian ekspor langsung. Menurut Kotler dan Keller (2009:323) ekspor tidak langsung adalah bekerja melalui perantara independen,yaitu pedagang ekspor berbasis domestik membeli produk perusahaan kemudian menjual di luar negeri. Sedangkan ekspor langsung adalah perusahaan melakukan sendiri kegiatan-kegiatan ekspor ke luar negeri walaupun dalam pelaksanaan rincinya mungkin tetap perlu melibatkan perusahaan-perusahaan jasa (Kotabe dan Helsen, 2005:272). Kekurangan dan kelebihan dari ekspor langsung dan tidak langsung dijelaskan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Kelebihan dan Kekurangan Ekspor Langsung dan Tidak Langsung

Ekspor	Kelebihan	Kekurangan
Langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi pasar lebih dapat digarap 2. Perusahaan lebih memiliki pengawasan atas operasi internasional 3. Loyalitas pelanggan terhadap merek-merek eksportir dapat lebih mudah dibangun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memerlukan komitmen atas sumber-sumber daya 2. Risiko lebih tinggi pada tahun awal
Tidak Langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi lebih kecil 2. Risiko lebih kecil 3. Perusahaan memperoleh keahlian pasar luar negeri secara instan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan cenderung tidak memperoleh pengetahuan pasar ekspor 2. Perusahaan tidak atau hanya sedikit peduli atas produk

Sumber : Data diolah

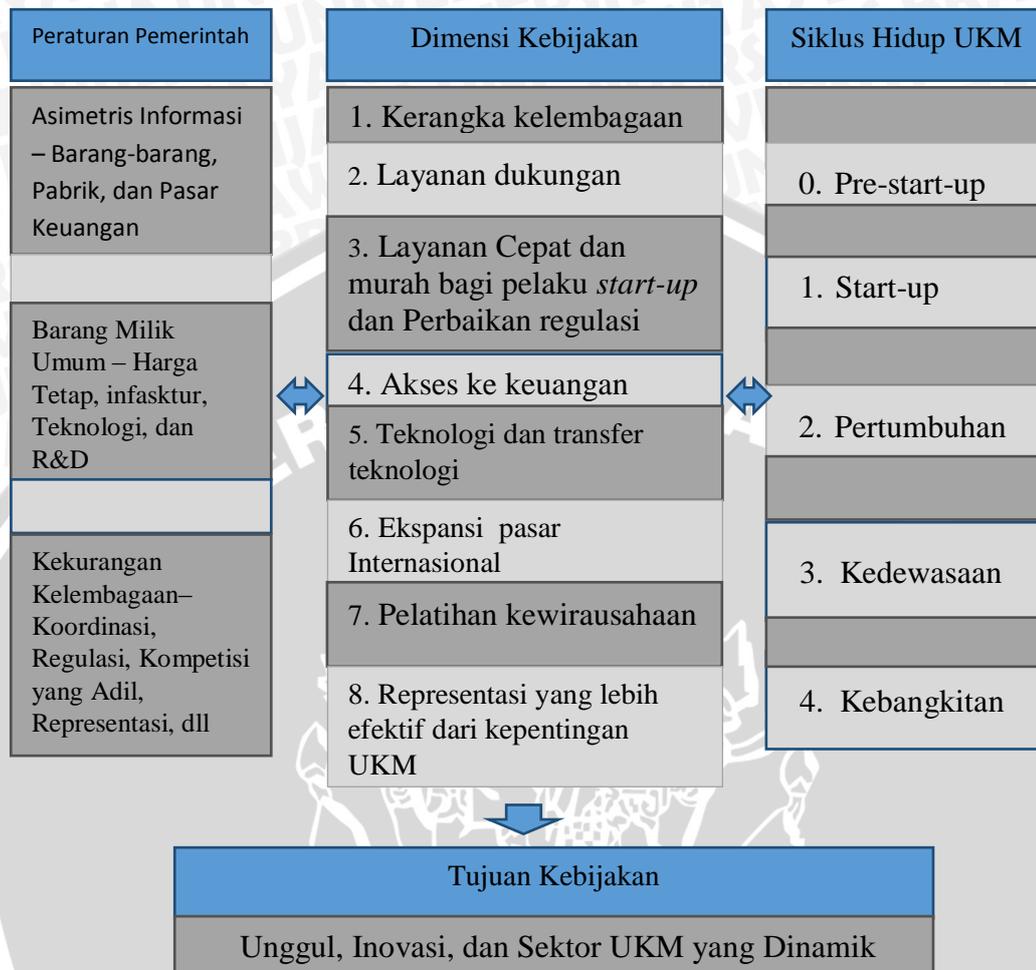
F. SME Development Index

SME Development Index atau Indeks Perkembangan Usaha Kecil Menengah merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia. Indeks kebijakan perkembangan UKM ditujukan untuk pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas, peningkatan kemampuan pemasaran UKM, akses pembiayaan, akses teknologi, dan penciptaan kebijakan lingkungan yang kondusif (ERIA, 2008:3). Kebijakan ini pada intinya untuk membantu kemajuan UKM serta menambah pertumbuhan UKM.



Prospek perkembangan UKM yang sangat besar sehingga Pemerintah berusaha untuk melindungi kegiatan bisnis serta melindungi masyarakat dari pelanggaran bisnis melalui kebijakan dan peraturan yang tepat. Indeks Kebijakan UKM dirancang untuk meningkatkan lingkungan bisnis yang relevan pada salah satu dari lima tahap siklus hidup (pre start-up, start-up, pertumbuhan, kedewasaan, dan kebangkitan) agar UKM menjadi lebih kompetitif, inovatif, dan dinamis.

Indeks dalam kebijakan pengembangan UKM dapat diukur dengan menggunakan nilai dari angka 1 yaitu kebijakan yang buruk atau tidak ada kebijakan yang terpenuhi sampai nilai angka 6 yaitu kebijakan berfungsi dengan baik dan efektif. Adanya penilaian dari angka 1 sampai 6 dapat mempermudah menjelaskan kebijakan pengembangan UKM yang berjalan pada sebuah daerah. Penilaian sesuai dengan hasil delapan indikator yang dilakukan di daerah dimana UKM ingin dikembangkan. Indeks Kebijakan Perkembangan UKM yang digunakan pada penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Kerangka Indeks Kebijakan Perkembangan UKM dan Siklus Hidup

Sumber : ERIA (2008:6)

Indeks Kebijakan Perkembangan UKM ada 8 dimensi kebijakan, kebijakan tersebut didasarkan pada *ASEAN SME Blueprint*, Rencana Strategis, dan *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*. Kebijakan 8 dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1) Kerangka Kelembagaan

Peran Pemerintah dalam pengembangan UKM sangat penting guna membangun kepercayaan pada pengusaha untuk menunjang pertumbuhan UKM. Menurut OECD (2009) pada ERIA (2008:11) Tujuan dari kerangka kelembagaan adalah memastikan konsistensi dan pelaksanaan yang efektif dari seluruh kebijakan pengembangan UKM. Kebijakan kerangka kelembagaan meliputi koordinasi yang baik dalam lembaga pemerintah, strategi pengembangan UKM yang efektif, dan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah formal dan informal dari UKM.

2) Layanan Dukungan

UKM sangat membutuhkan dukungan baik dari Pemerintah maupun asosiasi bisnis yang relevan untuk mereka tumbuh. Adanya akses ke layanan dukungan sangat penting untuk membangun kapasitas pada UKM. Layanan dukungan ini berguna untuk transfer teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik serta untuk mengakses informasi yang diperlukan UKM.

3) Layanan Cepat dan murah bagi pelaku *start-up* dan Perbaikan regulasi

Pendaftaran usaha pada Pemerintah merupakan prosedur yang sangat penting untuk meresmikan bisnis mereka sehingga akan menumbuhkan kepercayaan pada pelanggan mereka. Dengan meresmikan bisnis, perusahaan akan mendapatkan keuntungan, yaitu

layanan bisnis, keuangan, maka akan meningkatkan peluang untuk peningkatan produktivitasnya. Sehingga, perlu adanya perbaikan dalam sistem pendaftaran perusahaan, karena tahap yang paling rapuh adalah pada waktu perusahaan *start-up*. Sistem pendaftaran yang panjang dan mahal akan menghambat awal operasi perusahaan sehingga akan mengurangi pertumbuhan UKM. Penting untuk dicatat bahwa UKM dalam berkembang membutuhkan peraturan yang baik dari Pemerintah dan regulasi yang efisien. Pemerintah perlu mempermudah saat UKM dalam tahap *start-up* untuk mendaftarkan usahanya dan merumuskan UU dan peraturan yang baik bagi UKM.

4) Akses ke Keuangan

Kesempatan untuk mengakses sejumlah keuangan menjadi sangat penting untuk usaha kecil untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang mereka butuhkan untuk mendapatkan pijakan di pasar. Sejumlah besar UKM masih mengandalkan sumber daya internal mereka untuk tahap *start-up* dan ekspansi bisnis. Pada kinerja UKM, akses keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan inovasi UKM dan partisipasi di pasar ekspor.

Akses keuangan dalam peminjaman yang mudah dan bunga yang ringan mampu membuat UKM melakukan inovasi dan memasuki pasar luar negeri. Langkah-langkah kebijakan diperlukan untuk memperdalam dan memperluas pasar keuangan dengan tujuan mendorong persaingan yang lebih besar. Kebijakan tersebut dapat

berupa penyedia sumber daya keuangan, mengurangi biaya pinjaman, dan merangsang penyediaan lebih besar dari pembiayaan untuk meningkatkan pengembangan diversifikasi produk dan layanan yang lebih cocok dalam memenuhi kebutuhan UKM.

5) **Teknologi dan Transfer Teknologi**

Peningkatan kemampuan inovasi perusahaan lokal tergantung pada seberapa berhasil mereka memanfaatkan teknologi yang ada. Meningkatkan kemampuan inovasi dalam perusahaan biasanya melalui fasilitas berbagi pengetahuan yang dilakukan Universitas dan transfer teknologi. Namun, fasilitas ini memerlukan banyak investasi, dan mekanisme pasar saja tidak dapat cukup diberikan pada mereka. Pemerintah dapat membantu perusahaan mengurangi kendala ini melalui beberapa pilihan kebijakan, mulai dari pajak insentif untuk dukungan teknis untuk penyediaan infrastruktur teknis (ERIA, 2008:81).

6) **Ekspansi Pasar Internasional**

Kontribusi UKM pada pasar Internasional mulai meningkat dengan adanya globalisasi. UKM juga memiliki keterampilan dalam berurusan dengan pelanggan baik di dalam negeri dan pasar luar negeri. Namun, pengusaha UKM memiliki pengetahuan tentang bahasa dan budaya yang terbatas serta hukum dan masalah birokrasi dalam berpartisipasi di pasar ekspor. Perkembangan UKM dalam pasar internasional saat ini tetap atau bahkan menurun. Hal ini dikarenakan Pengusaha UKM

mengalami kurangnya dukungan infrastruktur bisnis dan dalam beberapa negara dapat didiskriminasi terhadap perusahaan besar. Oleh karena hal tersebut, Pemerintah perlu mendukung UKM dengan membuat strategi promosi ekspor, memberikan informasi, menyediakan peningkatan potensial UKM dalam ekspor dan fasilitas keuangan untuk ekspor.

7) Pelatihan Kewirausahaan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penentu UKM untuk berhasil. Sumber daya manusia yang bagus dan tepat akan membantu UKM untuk meningkatkan produktifitasnya dan perusahaan. Mengembangkan sumber daya manusia dan semangat kewirausahaan UKM membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Pendekatan ini yang berupa reformasi pendidikan yang luas, adanya dorongan kewirausahaan, keterampilan dan inovasi dalam masyarakat, dan program dukungan pemerintah yang tepat.

8) Representasi yang Lebih Efektif dari Kepentingan UKM

Kebijakan ini merupakan pembentukan sebuah asosiasi bagi UKM untuk memberikan wadah hubungan antara para pengusaha. Asosiasi UKM juga dapat menjadi swadaya bagi masyarakat di mana anggotanya dapat berbagi nilai-nilai sosial budaya yang sama. Kehadiran asosiasi bisnis akan memberikan banyak manfaat bagi UKM, salah satunya adalah untuk mengatasi kerugian dari mereka yang secara politik terpinggirkan.

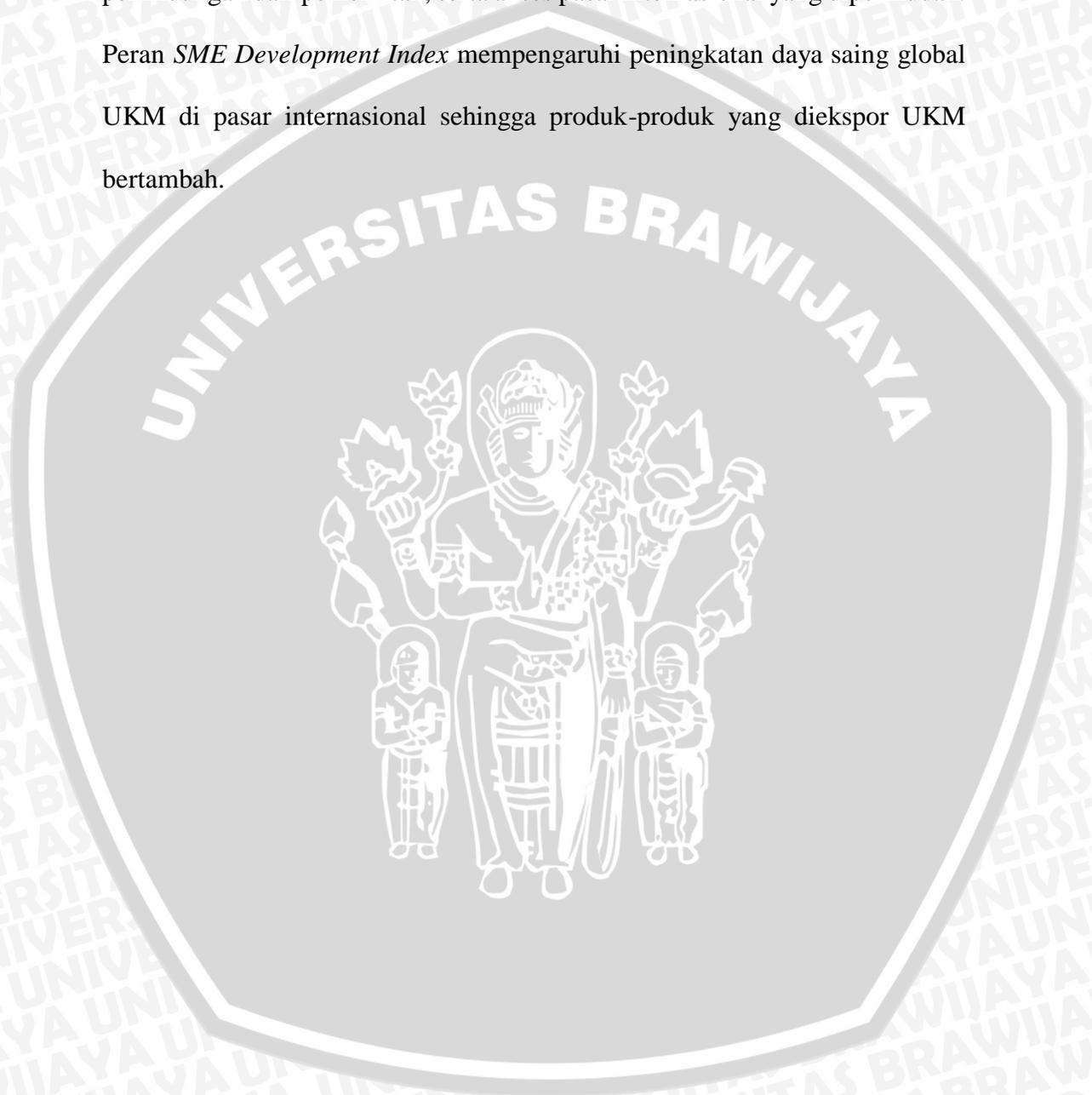
G. *SME Development Index* Sebagai Indikator Yang Mengukur Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UKM

Peningkatan pengembangan UKM di Indonesia memiliki peran penting bagi pembangunan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Mengingat pentingnya UKM dalam pembangunan ekonomi Indonesia, mendukung untuk perusahaan kecil menjadi aspek penting dari kebijakan (Mouregene, 2012). Dukungan Pemerintah yang berupa kebijakan pengembangan UKM ini memiliki berbagai bentuk, mulai dari memberikan akses istimewa kepada UKM di sektor-sektor tertentu untuk program kredit yang lebih tradisional atau subsidi, serta pelatihan dan konseling.

SME Development Index menjadi indikator pengukur yang berperan penting bagi UKM dalam peningkatan daya saing global. Pelaku UKM mulai meningkatkan pangsa pasarnya ke pasar internasional, yaitu dengan mengespor produk-produknya langsung maupun tidak langsung ke negara-negara lain. Menurut Tambunan (2012), pangsa UKM berorientasi ekspor di Indonesia masih terbilang rendah sehingga daya saing global UKM rendah dibandingkan dengan UKM di negara lain. Rendahnya daya saing global UKM dikarenakan dukungan Pemerintah masih belum memenuhi kebutuhan dari UKM. Daya saing global yang rendah membuat Pemerintah bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat rencana strategis dalam *SME Development Index* dalam meningkatkan daya saing global UKM.

Kebijakan *SME Development Index* berperan sebagai indikator untuk mempermudah pelaku UKM dalam mengembangkan usaha di pasar

internasional sehingga daya saing UKM dapat meningkat. Peran kebijakan UKM yaitu berupa akses keuangan yang dipermudah, transfer teknologi, perlindungan dari pemerintah, serta akses pasar internasional yang dipermudah. Peran *SME Development Index* mempengaruhi peningkatan daya saing global UKM di pasar internasional sehingga produk-produk yang diekspor UKM bertambah.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berguna dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi masalah dan menghadapi tantangan lingkungan. Metode penelitian bertujuan untuk membantu mengambil keputusan dengan cepat dan ilmiah pada sebuah organisasi atau perusahaan.

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari pendekatannya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Menurut Bungin (2007) dalam Purhantara (2010:59) penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang memanfaatkan peneliti sebagai instrumen, sehingga terjadi hubungan antara peneliti dengan fakta yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Bila dilihat dengan kedalaman analisisnya, metode penelitian ini dikategorikan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan model penelitian untuk memberikan penjelasan secara naratif mengenai perilaku dan/atau fenomena (Purhantara, 2010:165). Analisis penelitian deskriptif

hanya sampai taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai subyek yang diteliti baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dalam upaya mengidentifikasi faktor lingkungan perusahaan baik eksternal maupun internal.

Jenis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode dengan pendekatan kualitatif deskriptif dapat mempermudah peneliti dalam memperoleh data dari narasumber serta mempermudah dalam menganalisis dan menjelaskan hasil penelitian. Sehingga hasil penelitian dapat akurat sesuai dengan data dan pembahasan dari hasil penelitian lebih mudah dimengerti.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan lingkup penelitian yang dijadikan sebagai acuan wilayah penelitian sehingga peneliti memperoleh gambaran yang jelas mengenai situasi yang diteliti. Fokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan pusat perhatian dan dalam penelitian guna membatasi masalah.

Fokus penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kontribusi sektor UKM berorientasi ekspor terhadap ekonomi lokal di Kota Batu.

- 2) Implementasi 8 (delapan) kebijakan pengembangan UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Batu pada daya saing di pasar global.
- 3) Persepsi pelaku UKM berorientasi ekspor di Kota Batu terhadap kebijakan pengembangan daya saing global UKM.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat diadakannya suatu penelitian guna memperoleh data serta informasi dari seorang informan. Peneliti juga diharapkan agar dapat mengungkap keadaan-keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti termasuk ciri-ciri lokasi, serta kegiatan-kegiatan di dalamnya. Dalam hal ini menjadi lokasi penelitian adalah Kota Batu.

Pemilihan lokasi penelitian di Kota Batu karena Pemerintah Kota Batu saat ini melakukan aturan untuk mempermudah pelaku UKM melakukan kegiatan ekspor produk-produknya dan pengembangan daya saing UKM. Kemudahan peraturan ekspor oleh Pemerintah Kota Batu memberikan kesempatan para pelaku UKM untuk merambah pasar internasional, sehingga fenomena tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Batu. Adanya fenomena tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian antara kerjasama Pemerintah dan pelaku UKM dengan adanya kebijakan pengembangan daya saing UKM.

Situs penelitian merupakan suatu letak yang sebenarnya peneliti melakukan penelitian guna mendapatkan data yang valid, akurat, serta benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Situs penelitian dalam penelitian

ini yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Batu (DISKOPERINDAG Kota Batu) dan UKM di Kota Batu

D. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Purhantara (2010:79) adalah bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan wawancara beberapa narasumber. Narasumber sebagai responden yang dituju antara lain Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kota Batu serta pelaku UKM berorientasi ekspor Kota Batu.
- 2) Data Sekunder, yaitu sumber data yang terdiri dari segala data yang berhubungan dengan fokus penelitian yang dilaporkan oleh orang lain di luar penelitian dalam hal ini berarti data ini tidak langsung berhubungan dengan informan. Data sekunder penelitian adalah jurnal, artikel, buku, internet, dan laporan-laporan resmi lainnya terkait dengan pengembangan UKM secara global. Data sekunder kedua didapat dari kuisioner pelaku UKM. Informasi ini berfungsi untuk mengetahui respon pelaku UKM terhadap kebijakan pengembangan. Pelaku UKM yang digunakan dalam penelitian adalah pelaku UKM berorientasi ekspor.

Kedua sumber data tersebut sangat penting dan diperlukan guna menunjang penelitian untuk ketepatan informasi yang relevan dengan variable-variabel penelitian dan digunakan untuk menyederhanakan data yang akan dikumpulkan sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan dari data tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penelitian yang menentukan tingkat keakuratan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang sistematis akan membantu dalam proses penelitian selanjutnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan sumber informasi-informasi dan data-data dengan cara terjun langsung ke obyek yang dijadikan sebagai sasaran dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung behadapan dengan subjek penelitian atau responden. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kota Batu dan Pelaku UKM berorientasi ekspor Kota Batu.

2) Observasi

Selain wawancara, observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Teknik observasi pada hakikatnya merupakan salah satu teknik yang memanfaatkan panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Menurut Purhantara (2010:86) metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku (subyek), benda, atau kejadian (obyek) daripada metode wawancara. Dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan catatan lapangan yang merupakan catatan-catatan yang akan digunakan untuk mencatat data serta informasi-informasi selama melakukan penelitian.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelaahan terhadap dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi dari pihak kedua. Dokumen-dokumen tersebut berupa buku-buku, jurnal, makalah, buletin-buletin, peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya (Arikunto, 2006:135). Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini agar membantu peneliti mempertajam perasaan dan memberikan analisis-analisis yang lebih akurat dari data yang diperoleh peneliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti guna mengumpulkan data terhadap masalah yang akan diteliti. Instrumen yang digunakan peneliti adalah:

1) Pendoman Wawancara

Pendoman wawancara merupakan panduan yang digunakan untuk menggali informasi-informasi yang berhubungan dan sesuai dengan fokus penelitian. Pendoman wawancara yaitu suatu daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber atau informan serta daftar pertanyaan didasarkan pada masalah-masalah yang akan diteliti. Pendoman wawancara digunakan agar hasil dari wawancara dapat mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

2) Peneliti Sendiri

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Peneliti dalam penelitian kualitatif disebut *Human Instrument*, berfungsi dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas hasil temuannya.

3) Catatan Lapangan

Catatan lapangan merupakan alat bantu penelitian yang berupa buku catatan dan alat tulis yang dapat digunakan untuk melakukan

pencatatan selama berada dilapangan. Catatan lapangan berisis pokok-pokok informasi yang didapatkan peneliti selama melakukan wawancara ataupun pengamatan langsung ke lapangan.

4) Perekam Suara

Perekam suara merupakan alat bantu yang digunakan untuk merekam kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan. Alat ini bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pencatatan informasi-informasi yang didapatkan.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah data tersebut berhasil dipilih dan dikumpulkan. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam Moleong (2007:103), analisis data merupakan proses pengorganisasian serta mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Penelitian menggunakan analisis data interaktif model Miles dan Huberman. Teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman (2014:15) dapat dilakukan dengan tiga alur kegiatan, yaitu:

1) Pengumpulan Data

Tahap yang dilakukan dengan mengumpulkan data saat dilapangan. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Saat di lapangan data dapat berkembang sesuai dengan fokus penelitian

yang ditetapkan. Saat di lapangan data dapat berkembang sesuai dengan kondisi lapangan.

2) Kondensasi Data

Tahap ini dilakukan dengan cara penjabaran dari data-data yang diperoleh saat di lapangan dalam bentuk laporan secara rinci dan lengkap. Laporan lapangan tersebut disederhanakan, dirangkum, dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data sebuah konsep.

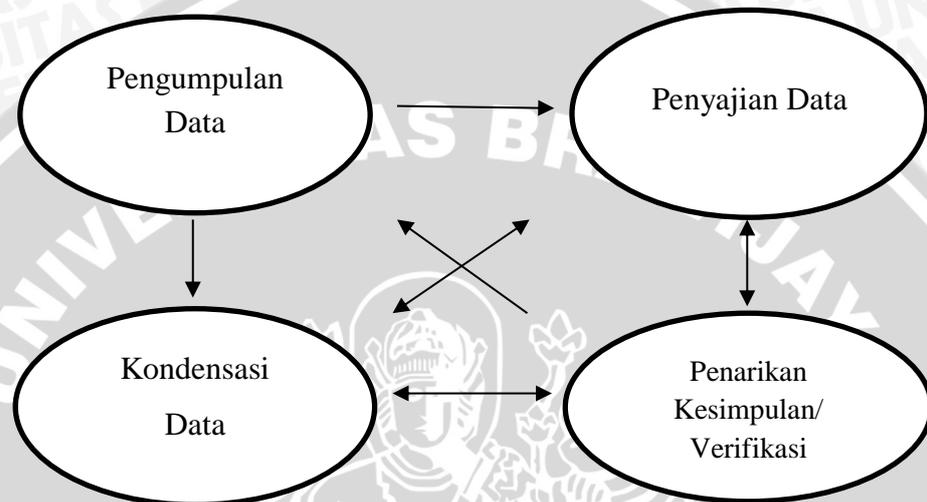
3) Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan data-data yang telah diperoleh secara terorganisir, dengan cara menyusun informasi-informasi yang diperoleh saat berada di lapangan dan memungkinkan untuk melakukan penggambaran kesimpulan awal. Tahap ini membantu peneliti dalam melakukan pemahaman terhadap permasalahan yang ada. Tujuan dari adanya tahap penyajian data adalah untuk merancang dan menyusun informasi yang telah diperoleh menjadi bentuk yang mudah dipahami, sehingga dapat dilakukan analisa atas apa yang terjadi.

4) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap ini merupakan kegiatan yang menggambarkan kesimpulan serta verifikasi yang dilakukan mulai awal pengumpulan data saat di lapangan. Kesimpulan dari verifikasi merupakan hasil analisis.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penulisan ini nantinya akan merujuk pada poin-poin di atas. Penulisan skripsi yang sesuai poin di atas, diharapkan saat proses penulisan akan lebih terarah. Uraian di atas dijabarkan ke dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Miles dan Huberman (2014:20)

H. Keabsahan Data

Pendekatan penelitian kualitatif membutuhkan pengujian dalam keabsahan data sehingga data yang diperoleh menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti akan melakukan triangulasi (*check* dan *recheck*). Metode triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dianggap relevan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan triangulasi teknik.

Tringulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2015:83). Pada tringulasi teknik peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner. Tiga teknik pengujian kredibilitas tersebut jika mendapatkan hasil data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut untuk mendapatkan hasil data yang benar.

Penelitian ini dilakukan peneliti menggunakan wawancara dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Batu (DISKOPERINDAG Kota Batu) dan pelaku UKM berorientasi ekspor. Kuisioner terhadap Usaha Kecil Menengah berorientasi ekspor di Kota Batu dapat dijadikan tringulasi untuk menjadikan keabsahan data, karena dapat menjadi sumber informasi dalam melakukan *cross check* atas data yang didapatkan peneliti dari pihak pengelola Usaha Kecil dan Menengah yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Batu. Sumber dalam tringulasi ini, yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu serta para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berorientasi ekspor, ditampilkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Triangulasi Teknik

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

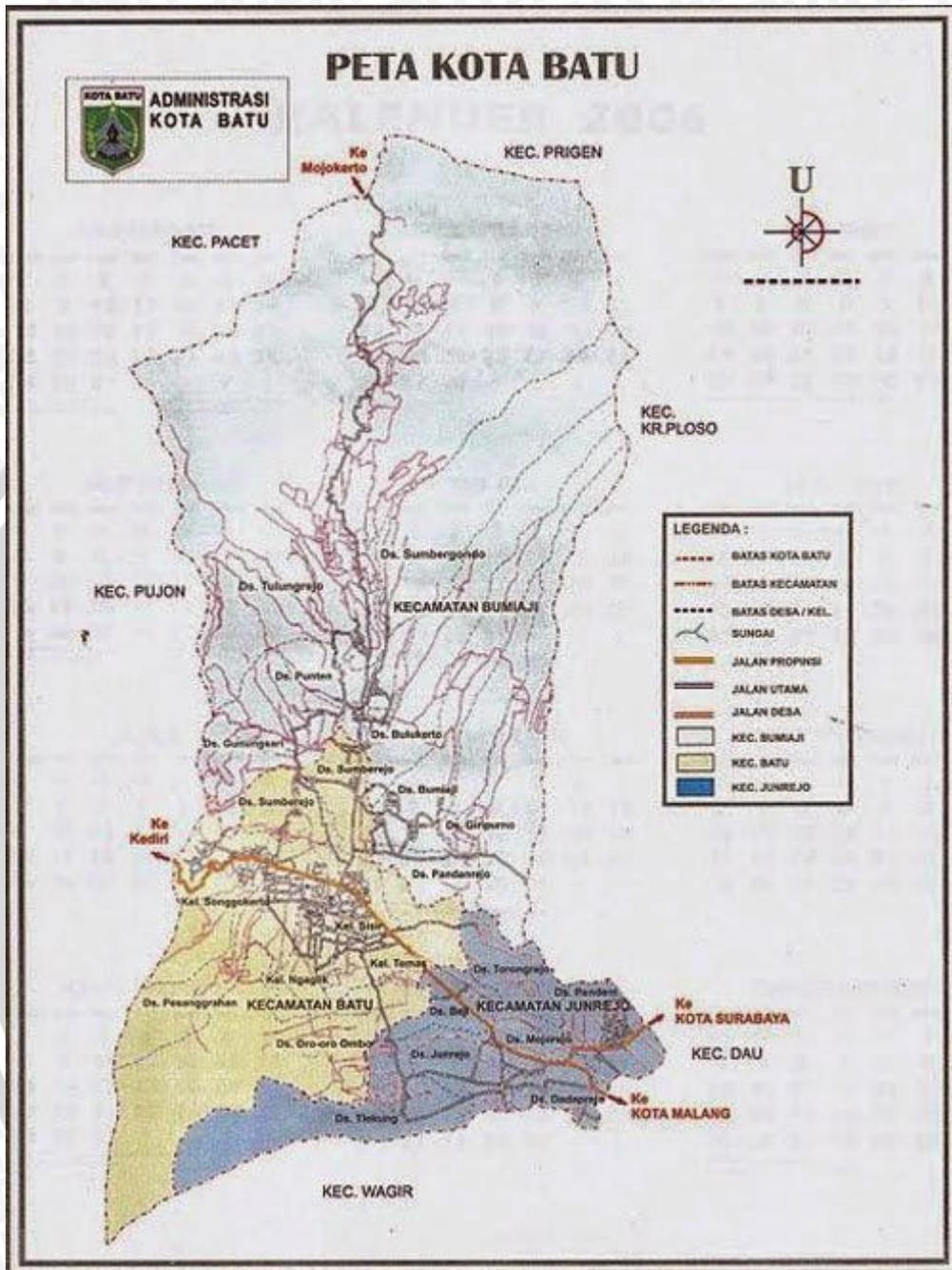
1. Kota Batu

a) Profil Kota Batu

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Batu terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Wilayah kota Batu berada di ketinggian 700-1.700 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 12-19 derajat Celsius.

Kota Batu sebagai Daerah Otonom di Jawa Timur telah memasuki tahun ketiga belas. Kota Batu sebelumnya merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan I (SSWP 1) Malang Utara. Perkembangan Kota Batu saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dibandingkan pada saat mula terbentuk pada tahun 2004. Pada tahun 2012, Kota Batu terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji.





Gambar 4.1 : Peta Kota Batu

Sumber : <http://www.google.com/gambar> peta kota batu yang diakses pada tanggal 11 Februari 2016, pukul 13.00 WIB.

Kota Batu ditinjau dari segi astronominya terletak diantara $7^{\circ} 55' 20'' - 7^{\circ} 57' 20''$ Bujur Timur, $115^{\circ} 17' 0'' - 118^{\circ} 19' 0''$ Lintang Selatan (BPS, 2017). Adapun batas-batas wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
2. Sebelah Timur : Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Dau, Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang

Kota Batu secara umum terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu daerah lereng/bukit dengan proporsi lebih luas dan daerah daratan. Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 199908,72 ha atau sekitar 0.42% dari total luas Jawa Timur. Daerah Kota Batu merupakan daerah yang topografinya sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata air terjun kolam renang, dan sebagainya. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin.

Kota Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia karena potensi keindahan alam yang luar biasa. Kekaguman bangsa Belanda terhadap keindahan dan keelokan alam Batu membuat wilayah kota Batu disejajarkan dengan sebuah negara di Eropa yaitu

Swiss dan dijuluki sebagai *De Kleine Zwitserland* atau Swiss Kecil di Pulau Jawa.

b) Visi dan Misi

1. Visi

Kota batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing ditopang sumberdaya (alam, manusia dan budaya) yang tangguh diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi

- a. Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama
- b. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
- c. Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik
- d. Meningkatkan Posisi Peran dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional
- e. Optimalisasi Pemerintahan Daerah
- f. Peningkatan Kualitas Pendidik dan Lembaga Pendidikan
- g. Peningkatan Kualitas Kesehatan

- h. Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah , Fasilitas Publik, Prasarana dan Sarana Lalu Lintas
 - i. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Guna Peningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
 - j. Menciptakan Stabilitas dan Kehidupan Politik di Kota Batu Yang Harmonis dan Demokratis
 - k. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi dan UKM
- c) Logo Kota Batu**

Shining Batu merupakan brand baru Kota Batu, yang diluncurkan pada tanggal 20 Mei 2013. Shining Batu memiliki makna sebagai Batu yang bersinar. Simbol Shining Batu juga memiliki tujuan bahwa Batu akan bersinar melalui bidang Pariwisata, Pertanian dan Pendidikan.



Gambar 4.2. Logo Shinning Batu

Sumber : (Arsip Pemerintah Kota Batu, 2013)

Logo *Shinning* Batu terdapat makna yang terkandung, yakni :

1. Menggambarkan bahwa Kota Batu adalah daerah yang nyaman, aman, tenteram, dan makmur
2. Kota Batu adalah daerah yang gemah ripah loh jinawi secara ekonomi dan memiliki jiwa kebersamaan yang tinggi antar warga Kota Batu
3. Kota Batu memiliki hubungan yang harmonis antara warga dan pemerintahnya. Serta memiliki *relationship* yang kuat antar seluruh *stakeholder*-nya
4. Merupakan gabungan dari tiga citra Kota Batu, yaitu pariwisata (merah), pertanian (hijau), dan pendidikan (biru)
5. Garis lengkung berwarna biru juga merupakan representasi hubungan vertikal manusia kepada Tuhan
6. Garis merah-orange menggambarkan hubungan horizontal antar sesama manusia
7. Garis lengkung hijau menggambarkan hubungan manusia kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan (alam)
8. Ketiga garis tersebut saling bersinergi membentuk bintang yang merupakan penggambaran bahwa Kota Batu merupakan kota impian

2. Usaha Kecil Menengah (UKM) Berorientasi Ekspor

Usaha Kecil Menengah merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan warga

lokal. Usaha Kecil Menengah di Kota Batu mulai tumbuh karena Kota Batu memiliki keunggulan yaitu tanah yang subur sehingga banyak tumbuhan serta tanaman yang tumbuh subur. Keunggulan yang dimiliki Kota Batu selanjutnya adalah saat ini berkembang menjadi tempat pariwisata juga meningkatkan masyarakatnya untuk memulai usaha bisnis mereka. Keunggulan – keunggulan Kota Batu ini membuat banyak masyarakatnya mulai mendirikan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Usaha bisnis tersebut berupa usaha tanaman hias dan bunga, perkebunan, kerajinan, hingga usaha oleh-oleh khas Kota Batu.

Usaha Kecil Menengah di Kota Batu mulai bertumbuh pada tahun 2005, di mana mulai banyak masyarakat Kota Batu yang mendirikan usaha untuk memenuhi kebutuhan produk masyarakat Kota Batu. Pertumbuhan UKM mulai meningkat pada tahun 2009 sampai 2016, pertumbuhan UKM ini dikarena Kota Batu berkembang menjadi Kota Pariwisata sehingga masyarakat yang mulai membuka usaha bisnis. Menurut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Batu (DISKOPERINDAG) saat ini Usaha Kecil Menengah di Kota Batu berjumlah sebanyak 14.570 usaha. Data jumlah UKM Kota Batu dijabarkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. Data Pertumbuhan UMKM Kota Batu Tahun 2009-2016

Data Pertumbuhan UMKM Kota Batu Tahun 2009-2016

NO	JENIS DAN KRITERIA USAHA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	MIKRO	1085	3015	2529	1685	2578	853	460	30	12235
	Pertanian / ternak	425	1130	910	433	903	288	231	0	4320
	Kerajinan / Industri	253	637	557	310	386	224	69	0	2436
	Perdagangan	291	741	660	520	1160	301	106	30	3809
	Jasa dan Sektor Lain	116	507	402	422	129	40	54	0	1670
2	KECIL	163	142	187	221	331	363	374	285	2066
	Pertanian / ternak	3	0	0	0	26	0	0	0	29
	Kerajinan / Industri	10	67	57	92	62	75	86	99	548
	Perdagangan	148	75	130	129	239	288	288	186	1483
	Jasa dan Sektor Lain	2	0	0	0	4	0	0	0	6
3	MENENGAH	27	15	29	35	53	41	22	47	269
	Pertanian / ternak	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Kerajinan / Industri	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Perdagangan	27	15	29	35	50	41	22	47	266
	Jasa dan Sektor Lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1275	3172	2745	1941	2962	1257	856	362	14570

Sumber : DISKOPERINDAG Kota Batu, 2017

Data pertumbuhan UKM di Kota Batu menjelaskan bahwa pada tahun ke tahun UKM di Kota Batu semakin bertambah. UKM yang semakin bertambah membuat daya saing antar usaha bisnis meningkat sehingga para pelaku usaha mulai mengembangkan pangsa pasar mereka. Pelaku UKM Kota Batu kemudian mengembangkan usaha ke pasar internasional dengan melakukan pemasaran ekspor. UKM berorientasi ekspor di Kota Batu menurut DISKOPERINDAG Kota Batu berjumlah 11 usaha hingga tahun 2016.

Tabel 4.2. Data Usaha Kecil Menengah Berorientasi Ekspor

NO	NAMA UKM	NAMA PEMILIK	PRODUK	PANGSA PASAR
1.	ARJUNA FLORA	Ir. LUKI BUDIARTI	Botol Plastik	Jepang
2.	RAMAYANA ARGO MANDIRI	MASHUDI, SE	Keripik Buah, Jenang Buah	Malaysia
3.	BAGUS AGRISETA MANDIRI	SYAMSUL HUDA	Keripik Buah, Jenang Buah, Sari Apel	Taiwan
4.	SELECTA <i>FRUIT</i>	EDY SUPRAPTO	Keripik Buah	Malaysia
5.	DELTA KARYA	SUPRIYANTO	Mebel	Jepang
6.	FURNITURE ANTIK	ADI ANUGERAH	<i>Furniture</i>	Malaysia
7.	ARJUNA 999	HARI MASTUTIK	Keripik Tempe, Rempyek, Keripik Buah	Taiwan, Hongkong
8.	HANDICRAFT KAYU WIJAYA	ABDUL MUIN	Kerajinan Kayu	Jepang, Korea Selatan
9.	ARJASA	SUKARDI	Kerajinan Kayu	Amerika, Jepang, Korea Selatan
10	VIGOUR	JAYADI	Keripik Buah	Malaysia
11.	BERKAH	TUNIK JULAIKA	Handicraft dari kayu	Turki

Sumber : DISKOPERINDAG Kota Batu, 2017

Pertumbuhan UKM yang berorientasi ekspor pada Tabel 4.2. menjelaskan bahwa para pelaku UKM sudah mulai meluaskan pangsa pasarnya untuk memperkenalkan produk-produk buatan UKM Kota Batu. Produk-produk ekspor dari UKM Kota Batu yaitu berupa panganan dan produk plastik. Produk panganan yang menjadi produk ekspor adalah keripik sayur dan keripik buah sedangkan produk plastik adalah produk botol plastik untuk minuman. Berkembangnya produk Kota Batu di pasar internasional meningkatkan daya saing UKM sehingga para pelaku UKM dapat meningkatkan inovasi untuk mengembangkan usaha mereka pada skala global.

B. Penyajian Data

1. Kontribusi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berorientasi Ekspor Terhadap Ekonomi Lokal di Kota Batu

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat diakui menjadi peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang bahkan di negara maju. Kontribusi UKM sangat penting karena adanya usaha ini dapat menyerap banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar (Tambunan, 2012:1). Peranan UKM pada saat ini sangat dibutuhkan untuk pembangunan sebuah daerah karena berkembangnya UKM di sebuah daerah akan meningkatkan pendapatan masyarakat suatu daerah. Peningkatan pertumbuhan UKM dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Agustina (2015:6) juga

menjelaskan kontribusi UKM memberikan efek positif terhadap masalah-masalah ekonomi dan sosial, berupa tingginya tingkat kemiskinan, besarnya pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan masalah urbanisasi. Beberapa penjelasan diatas mengarah bahwa berkembangnya UKM di suatu daerah berkontribusi untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperbaiki ketimpangan sosial masyarakat daerah.

Perkembangan UKM yang saat ini mulai meluaskan pangsa pasarnya dengan memasuki pasar ekspor dapat memberikan kontribusi yang positif pula. Kontribusi UKM berorientasi ekspor dalam perekonomian menurut Bank Indonesia (2009) yaitu, (1) sumber pendorong pertumbuhan ekspor; (2) pendukung bagi usaha besar dengan menyediakan bahan tertentu; dan (3) sebagai penompang perekonomian. Adanya kontribusi UKM berorientasi ekspor memberikan kekuatan ekonomi sebuah daerah bahkan negara. Perkembangan UKM berorientasi ekspor yang meningkat membuat daerah tersebut menjadi semakin berinovasi dalam menciptakan produk untuk bersaing dengan produk negara lain.

Kota Batu merupakan salah satu salah kota yang memiliki UKM cukup banyak yaitu 14.570 usaha. Perkembangan UKM Kota Batu semakin meningkat disebabkan oleh Kota Batu yang berkembang menjadi kota wisata. Kota Wisata Batu memiliki tempat wisata seperti Batu *Night Spectacular*, Jawa Timur Park, Museum Angkut, Desa Wisata Oro-Oro Ombo, Desa Wisata Agro Bumiaji, dan lain-lain, sehingga meningkatkan

pertumbuhan UKM yang menghasilkan produk-produk daerah. Adanya pertumbuhan UKM Kota Batu yang meningkat membuat pelaku usaha ingin memperluas pangsa pasarnya ke pasar global, sehingga banyak pelaku usaha menjual produknya ke pasar ekspor. Saat ini, Kota Batu memiliki pelaku usaha UKM yang berorientasi ekspor sebanyak 11 usaha yang dijabarkan pada Tabel 4.2. tumbuhnya UKM ekspor ini memberikan kontribusi yang baik bagi pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah. Atas dasar hal tersebut, untuk menjawab fokus penelitian yang pertama, peneliti memberikan beberapa item pertanyaan yang dijawab oleh dua orang informan dari Kepala dan Staff Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kota Batu.

a. Perkembangan UKM Berorientasi Ekspor di Kota Batu

Setiap usaha kecil yang didirikan selalu diharapkan berkembang dengan baik dan bertahap menjadi usaha yang besar. Perkembangan usaha dalam sebuah daerah memberikan peningkatan pendapatan daerah tersebut. Pertumbuhan UKM yang meningkat di Kota Batu sebanyak 14.570 usaha membuat perkembangan UKM untuk memperluas usaha ke pasar global mulai meningkat secara bertahap. UKM berorientasi ekspor di Kota batu memperluas pangsa dengan mengeksport produk-produk buatan UKM Kota Batu sendiri. Perkembangan UKM berorientasi ekspor di Kota Batu dijelaskan oleh Bapak Rahman Safi'i selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Industri

Kecil dan Menengah Kota Batu pada tanggal 9 Februari 2017 pukul 10.05 WIB , bahwa :

“Dari UKM yang berjumlah 14.570 usaha, saat ini masih sedikit UKM yang melakukan ekspor. DISKOPERINDAG Kota Batu sendiri mendata saat ini hanya beberapa UKM yang melakukan ekspor. Namun, perkembangan UKM ekspor cukup baik untuk saat ini karena Kota Batu yang menjadi kota wisata memberikan dampak yang baik bagi UKM. Hal tersebut terjadi karena mulai banyak wisatawan asing yang berkunjung ke Batu sehingga memberi kesempatan bagi UKM untuk mengenalkan produknya ke para wisatawan asing. Kesempatan ini membuat UKM mulai berani untuk ekspor.”

Perkembangan UKM berorientasi ekspor yang meningkat walaupun tidak terlalu signifikan juga dijelaskan sesuai dengan informasi dari Bapak Herwindra Danang selaku Kepala Seksi Bina Usaha Dan Perlindungan Bidang Industri Kota Batu pada tanggal 9 Februari 2017 pukul 10.45 WIB, bahwa:

“Saat ini, perkembangan UKM berorientasi ekspor meningkat sedikit walaupun tidak terlalu signifikan, hanya beberapa UKM yang melakukan ekspor. Kalau di data bidang DISKOPERINDAG Kota Batu sendiri sampai tahun 2016 kemarin hanya berjumlah 11 UKM yang berpotensi ekspor. Salah satunya seperti Arjuna Flora yang melakukan ekspor ke Jepang. UKM berorientasi ekspor di Kota Batu hanya sedikit, padahal produk-produk yang dihasilkan pelaku UKM bisa diekspor karena produknya yang beragam seperti keripik buah brownies sayur, sari apel, dan kerajinan.”

Tabel 4.3. Perkembangan UKM Berorientasi Ekspor

No.	Tahun	Jumlah Usaha	Nama Usaha Orientasi Ekspor	Produk
1.	2006	2	1. Arjasa 2. <i>Selecta Fruit</i>	1. Kerajinan Kayu 2. Keripik Buah
2.	2007	2	1. Delta Raya 2. Berkah	1. Mebel 2. Kerajinan Kayu
3.	2008	1	1. <i>Furniture</i> Antik	1. <i>Furniture</i>
4.	2010	1	1. Vigour	1. Keripik Buah
5.	2011	2	1. Arjuna 999 2. Handicrat Kayu Wijaya	1. Keripik Tempe, Keripik Buah, Rempeyek 2. Kerajinan Kayu
6.	2012	1	1. Ramayana Agro Mandiri	1. Keripik Buah, Jenang Buah
7.	2013	1	1. Bagus Agriseta Mandiri	1. Keripik Buah, Jenang Buah, Sari Apel
8.	2016	1	1. Arjuna Flora	1. Botol Plastik

Sumber : DISKOPERINDAG Kota Batu (2017)

Indikator dalam mengukur UKM tersebut berorientasi ekspor . Indikator tersebut adalah salah satu bentuk untuk mengetahui perkembangan UKM yang melakukan ekspor di Kota Batu. Selain itu, indikator ini memberikan keuntungan untuk mendapatkan jumlah UKM di Kota Batu yang berorientasi ekspor. Bapak Danang menerangkan bahwa indikator UKM ekspor di Kota Batu yaitu:

1. Produksi yang sudah besar dan banyak;
2. UKM sering mengikuti pameran internasional dan nasional;
3. UKM Kota Batu mempunyai pangsa pasar yang luas.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari dua informan, yaitu Bapak Rahman Safi'I selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Industri Kecil dan Menengah dan Bapak Herwindra Danang selaku Kepala

Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Bidang Industri Kota Batu, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan UKM berorientasi ekspor di Kota Batu meningkat secara perlahan namun tidak terlalu signifikan. UKM berorientasi ekspor di Kota Batu saat ini berjumlah sebanyak 11 usaha, variasi produk yang terdiri dari produk keripik, sari apel, mebel, kerajinan kayu, dan botol plastik. Adanya indikator yang diberikan Pemerintah Kota Batu menerangkan bahwa jumlah UKM berorientasi ekspor di Kota Batu masih rendah.

b. Kontribusi UKM Berorientasi Ekspor bagi perekonomian Kota Batu

UKM diharapkan tidak hanya sebagai sumber penting dalam peningkatan kesempatan kerja, tetapi juga dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekspor Indonesia. Begitu pula harapan Pemerintah Kota Batu bagi UKM berorientasi ekspor, berkembangnya UKM berorientasi ekspor di Kota Batu dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan dan pembangunan daerah Kota Batu. Pemerintah Kota Batu khususnya DISKOPERINDAG Kota Batu menjelaskan bahwa kontribusi UKM sebagai berikut :

” Kontribusi UKM menurut saya bagi perekonomian Kota Batu salah satunya adalah dapat menyerap tenaga kerja di Kota Batu, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Batu. Perekonomian di Kota Batu meningkat salah satunya karena banyaknya UKM yang ada di Kota Batu.” (Bapak Rahman Safi’i, Kepala Bidang Usaha Mikro Industri Kecil dan Menengah Kota Batu).

Menyambung dengan penjelasan dari Bapak Rahman, informan kedua yaitu Bapak Herwindra Danang selaku Kepala Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Bidang Industri Kota Batu juga menambahkan penjelasan mengenai kontribusi UKM berorientasi ekspor sebagai berikut :

“Kalau kontribusi UKM berorientasi ekspor salah satunya adalah UKM tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor di Kota Batu sehingga meningkatkan pendapatan daerah Kota Batu. Selain itu, UKM tersebut juga semakin meningkatkan produk-produk yang di ekspor ke negara lain karena produk yang mereka hasilkan beragam dan berinovasi.”

Penjelasan dari dua informan peneliti menjelaskan bahwa kontribusi UKM berorientasi ekspor sangat bagus bagi perekonomian Kota Batu. Kontribusi UKM dalam perekonomian Kota Batu sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Rahman dan Bapak Danang yaitu membantu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Batu, mendorong pertumbuhan produk ekspor di Kota Batu, dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan Pengembangan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Batu dalam Mengembangkan Daya Saing Global

Pengaruh arus globalisasi membuat pola perilaku masyarakat berubah menjadi masyarakat konsumtif sehingga mengakibatkan mulai banyak masyarakat mendirikan usaha bisnis untuk memenuhi perubahan tersebut. Pengaruh globalisasi yang mendorong berkembangnya UKM dalam

suatu daerah. Perkembangan UKM yang meningkat tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah. Dukungan Pemerintah diwujudkan dalam sebuah kebijakan untuk meningkatkan potensi UKM dalam pembangunan Nasional serta kiprahnya dalam perdagangan internasional.

Kebijakan Pengembangan UKM Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang disebutkan dalam UU no. 20 tahun 2008, di mana Pemerintah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi dan desain. Kebijakan ini diterapkan oleh Pemerintah Kota Batu untuk mempermudah pelaku UKM dan Pemerintah Kota Batu berhubungan dalam mengembangkan UKM serta meningkatkan daya saing UKM di pasar lokal dan pasar global. Kebijakan pengembangan Daya saing UKM pada pasar global yang baik mengisyaratkan bahwa produk yang diekspor digemari di luar negeri. Berdasarkan wawancara yang didapat dengan Kepala Bidang UKM dan Perindustrian Kota Batu mengenai daya saing global UKM di Kota Batu adalah sebagai berikut:

”UKM di Kota Batu untuk orientasi ekspor tidak begitu ketat karena di Kota Batu masih sedikit peminatnya sehingga daya saing UKMnya rendah. Saingannya sendiri untuk UKM orientasi ekspor di Kota Batu adalah produk dari negara China. Rendahnya daya saing ini ya karena produk yang diekspor hanya produk-produk yang dijadikan oleh – oleh seperti keripik maupun sari buah. Meski begitu, ada peningkatan pada daya saing global UKM walaupun tidak begitu signifikan.” (Bapak Rahman Safi’i, Kepala Bidang Usaha Mikro Industri Kecil dan Menengah Kota Batu)

Pernyataan serupa juga dijelaskan oleh Bapak Danang selaku Kepala Seksi Bina Usaha Dan Perlindungan Bidang Industri Kota Batu. Beliau

menambahkan bahwa daya saing global UKM berperan besar dalam mengembangkan pemasaran UKM di kancan internasional. Daya saing UKM Kota Batu yang masih rendah dikarenakan intensitas ekspor produknya sedikit, sumber daya manusia yang masih rendah untuk membuat inovasi dalam menciptakan barang, dan teknologi modern yang masih sedikit digunakan oleh pelaku UKM. Alasan tersebut yang mengurangi tingkat daya saing global UKM Kota Batu pada pasar internasional menjadi relatif rendah.

Daya saing global UKM Kota Batu yang rendah mendorong DISKOPERINDAG Kota Batu Bidang UKM untuk berperan serta dalam meningkatkan daya saing global UKM Kota Batu. Keberhasilan UKM untuk memiliki daya saing yang tinggi adalah adanya dukungan Pemerintah dalam membantu meningkatkan kualitas UKM di daerahnya. Menurut informan pertama dalam penelitian Bapak Rahman sebagai Kepala Bidang Usaha Mikro Industri Kecil dan Menengah, Pemerintah mempunyai peran untuk meningkatkan daya saing global UKM berorientasi ekspor sebagai berikut:

1. Mendorong UKM Kota Batu untuk mengikuti pameran pada skala nasional dan internasional.
2. Menyiapkan produk-produk UKM Kota Batu yang dapat bersaing dengan produk luar negeri.

3. Memfasilitasi UKM Kota Batu dengan memberikan merek dagang agar produk-produk hasil UKM lebih mudah dikenal oleh konsumen luar negeri.
4. Adanya verifikasi halal bagi produk makanan yang dihasilkan UKM Kota Batu.
5. Memfasilitasi adanya ISO dan Barcode pada produk UKM Kota Batu.
6. Mengadakan uji produk agar produk yang dihasilkan layak untuk diedarkan kepada masyarakat.

Sementara itu, informan kedua yaitu Kepala Seksi Bina Usaha Dan Perlindungan Bidang Industri Kota Batu menambahkan bahwa Pemerintah Kota Batu membantu UKM Kota Batu dalam bidang produksi. Pemerintah Kota Batu memberikan bantuan dalam bidang produksi bertujuan agar mempermudah dan mempercepat tingkat efisiensi produksi UKM Kota Batu. Bantuan dalam hal produksi ini adalah hibah alat, namun bantuan alat ini diberikan hanya kepada bentuk kelompok usaha bersama belum kepada usaha perseorangan.

Beberapa penjelasan yang diberikan oleh Bapak Rahman dan Bapak Danang dapat disimpulkan bahwa daya saing global UKM Kota Batu masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Rendahnya daya saing UKM Kota Batu pada pasar global diakibatkan pada masih rendahnya tingkat ekspor produk UKM, rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki, dan penggunaan teknologi yang masih kurang memadai.

Daya saing UKM pada pasar global yang rendah mengakibatkan Pemerintah Kota Batu untuk lebih mendorong kebijakan pengembangan UKM di Kota Batu agar berjalan lebih baik.

Penjelasan Pemerintah Kota Batu agar kebijakan pengembangan daya saing global UKM di Kota Batu berjalan lebih baik membuat peneliti untuk menanyakan lebih lanjut bagaimana implementasi kebijakan pengembangan UKM di Kota Batu. Peneliti menggunakan *SME Development Index* sebagai acuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pengembangan daya saing global UKM di Kota Batu. *SME Development Index* adalah langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Indeks tersebut berguna untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengembangan UKM berjalan di sebuah Negara. Dalam *SME Development Index* terdapat 8 dimensi kebijakan (ERIA, 2008:6), yaitu kerangka kelembagaan, layanan dukungan, layanan murah dan cepat bagi pelaku *start-up* serta perbaikan regulasi, akses keuangan, teknologi dan transfer teknologi, ekspansi pasar internasional, pelatihan kewirausahaan, dan representasi yang lebih efektif untuk kepentingan UKM.

a. Kerangka Kelembagaan

Pertumbuhan UKM pada suatu daerah merupakan suatu keinginan Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerahnya. Dalam menunjang pertumbuhan UKM tersebut Pemerintah perlu adanya

kepercayaan pelaku UKM. Kebijakan kerangka kelembagaan merupakan salah satu bentuk kebijakan untuk koordinasi lembaga pemerintah dengan pelaku usaha. Kerangka kelembagaan menjelaskan bahwa adanya kepercayaan anatar pelaku usaha kepada Pemerintah untuk mengatasi langkah-langkah yang tepat terhadap masalah-masalah informal dan formal UKM serta membantu pelaku UKM dalam koordinasi strategi pengembangan UKM. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kepala Bidang UKM dan Perindustrian dan Kepala Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Bidang Industri Kota Batu, kedua informan memberikan jawaban yang mengarah pada bahasan yang sama. Selama ini, jika pelaku UKM mendapatkan masalah informal maupun formal selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Batu bidang UKM. DISKOPERNDAG sebagai fasilitator memberikan wadah bagi para pelaku usaha untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Batu, yaitu Asosiasi Pengusaha Kota Batu (APKB). Pemerintah berkoordinasi dan bekerjasama dengan pelaku usaha mengenai masalah yang sedang dialami pelaku UKM atau memberikan arahan langkah-langkah yang dapat digunakan oleh pelaku UKM.

b. Layanan Dukungan

Mengembangkan sebuah usaha bagi pelaku UKM membutuhkan dukungan Pemerintah. Peningkatan UKM dalam lingkungan bisnis saat ini tidak hanya berasal pada para pelaku UKM itu sendiri

melainkan dukungan Pemerintah juga dibutuhkan untuk membangun kinerja serta usaha. Kepala Bidang UKM dan Perindustrian Bapak Rahman memaparkan bentuk layanan dukungan Pemerintah kepada pelaku UKM Kota Batu sebagai berikut:

“Pemerintah sangat mendukung segala tindak tanduk UKM selama itu baik bagi pembangunan Pemerintah dan UKM sendiri. Pemerintah sendiri saat ini memberikan kebebasan bagi UKM untuk menjamin perkembangan usaha mereka. Pemerintah juga memberikan suasana yang kondusif bagi UKM kemudian membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha bagi yang ingin melakukan usaha baru maupun lama. Kami juga membangun Pusat Layana Usaha Terpadu (PLUT) pada tahun 2013 untuk melayani dan melakukan konsultasi bagi pelaku UKM. PLUT sendiri dapat melayani pengusaha baru maupun lama selama mereka membutuhkan pelayanan. Semua pelayanan konsultasi ada jadwalnya masing-masing sehingga para pelaku UKM dapat menyesuaikan jadwal mereka dengan pelayanan konsultasi.”



Gambar 4.3. Pusat Layanan Usaha Terpadu Kota Batu

Sumber : PLUT (2017)

Bentuk dukungan yang diberikan Pemerintah Kota Batu, yaitu layanan PLUT merupakan suatu layanan yang efektif bagi pelaku UKM karena pada layanan tersebut UKM dapat lebih mudah mendapatkan konsultasi dengan cepat. Bapak Rahman menambahkan bahwa pada layanan PLUT terdapat beberapa konsultan yang dapat membantu pelaku UKM seperti konsultasi produksi, manajemen, dan pemasaran. Pelayanan PLUT Kota Batu memberikan beberapa layanan yaitu, konsultasi bisnis, memfasilitasi sarana dan prasarana promosi, memfasilitasi perluasan jaringan usaha, memfasilitasi akses permodalan, layanan pustaka, pendamping penerapan teknologi tepat guna dan produk unggulan daerah, dan bimbingan teknis pengembangan usaha dan penumbuhan wirausaha baru.

No.	Jenis Layanan	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
1	<u>Konsultasi Produksi</u> (Ir Riyanto)	12.00 s/d 16.00	09.00 s/d 13.00		12.00 s/d 16.00	
2	<u>Konsultasi Pemasaran</u> (Mashudi, SE)	12.00 s/d 16.00	12.00 s/d 16.00			09.00 s/d 14.00
3	<u>Konsultasi Sumber Daya Manusia & Kelembagaan</u> (Setyo Adi Saputra, SPd)	09.00 s/d 13.00		09.00 s/d 13.00	09.00 s/d 13.00	
4	<u>Konsultasi Pembiayaan</u> (Chandra Thirta S, SE)	09.00 s/d 13.00		12.00 s/d 16.00		09.00 s/d 14.00

Gambar 4.4. Jadwal Layanan Konsultasi

Sumber: PLUT UMKM (2017)

c. Layanan Murah dan Cepat bagi Pelaku *Start-up* serta Perbaikan Regulasi

“Saat ini Pemerintah Kota Batu mempermudah izin usaha pada para pengusaha, izin usaha di Kota Batu sudah digratiskan. Kemudian layanan pengurusan usaha sekarang lebih cepat. Semuanya sudah dipermudah untuk keberlangsungan usaha di Kota Batu. Regulasi pemerintah sendiri yang jelas semuanya memihak pada UKM. Selama untuk kebaikan dan pengembangan UKM Pemerintah memihak UKM. Kita sendiri sesuai dengan UU yang ada di Indonesia.”

Pemaparan di atas dijelaskan oleh Bapak Rahman Safi'i sebagai Kepala Bidang Usaha Mikro Industri Kecil dan Menengah Kota Batu. Beliau menjelaskan bahwa kemudahan bagi pengusaha baru sudah semakin baik. Kemudahan prosedur bagi UKM merupakan prioritas Pemerintah Kota Batu. Semakin cepat prosedur dan layanan Pemerintah maka akan meningkatkan perkembangan UKM di Kota Batu. Regulasi dalam Pemerintah Kota Batu dijelaskan lebih oleh Kepala Seksi Bina Usaha Dan Perlindungan Bidang Industri Kota Batu sebagai berikut:

“Peraturan daerah untuk UKM yang lebih baik jika di daerah Kota Batu sendiri tidak ada. Perda yang khusus untuk UKM masih belum ada, kita juga menginginkan jika UKM memiliki Perda khusus sehingga akan mempermudah untuk melindungi usaha mereka. Pemerintah Kota Batu mengikuti peraturan yang ada di Indonesia yaitu UU No. 20 tahun 2008.”

Penjelasan oleh Bapak Rahman dan Bapak Danang dapat diartikan bahwa untuk saat ini Kota Batu belum mempunyai Peraturan Daerah yang khusus untuk UKM di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu

menggunakan kebijakan pengembangan UKM sesuai dengan Peraturan Republik Indonesia yaitu UU No. 20 tahun 2008.

d. Akses Keuangan

Permodalan bagi UKM sangat penting untuk membangun UKM untuk memperluas usahanya dan mendapatkan akses sumber daya yang dibutuhkan usahanya. Kemudahan akses keuangan dalam peminjaman mampu membuat UKM melakukan inovasi pada produknya dan memasuki pasar internasional. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kepala Bidang UKM dan Perindustrian dan Kepala Seksi Bina Usaha Dan Perlindungan Bidang Industri Kota Batu, kedua informan memberikan jawaban yang sama. DISKOPERINDAG Kota Batu memfasilitasi permodalan bagi UKM dengan bekerjasama dengan Bank Jatim dan Telkom untuk memenuhi kebutuhan keuangan UKM. Selain itu, DISKOPERINDAG Kota Batu memberikan kemudahan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menyediakan Bank BRI serta Bank Jatim sebagai kemudahan melakukan kredit UKM.

e. Teknologi dan Transfer Teknologi

Pemanfaatan teknologi adalah salah satu syarat untuk meningkatkan daya saing UKM serta meningkatkan inovasi produk. Seiring dengan jaman yang semakin modern, teknologi menjadi semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang bergerak cepat dalam memproduksi suatu produk. Jika suatu

perusahaan kurang menguasai teknologi yang modern maka mereka akan ketinggalan dan perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan terhadap masyarakat dan mengembangkan bisnis UKM Kota Batu. Sehingga perlu adanya bantuan Pemerintah untuk mengejar ketertinggalan teknologi karena fasilitas ini memerlukan banyak investasi. Melalui kebijakan Pemerintah Kota Batu, informan dalam hal ini Kepala Bidang UKM dan Perindustrian Kota Batu, menjelaskan bahwa:

“Memang teknologi adalah kunci utama untuk meningkatkan inovasi perusahaan. Pemerintah membantu fasilitas ini namun untuk usaha bersama, sedangkan untuk usaha perseorangan Pemerintah belum bisa memfasilitasi. Kita memfasilitasi pada akses pemasaran produk mereka. Kita juga memfasilitasi teknologi pada bidang *desain packaging* produk UKM. Pajak insentif untuk mendukung teknis juga belum, mungkin nanti akan dibicarakan untuk pengembangan teknologi. Pemerintah sendiri ingin membantu tetapi masih belum memadai untuk memfasilitasi usaha yang berjenis perseorangan.”

f. Ekspansi Pasar Internasional

Mengembangkan pangsa pasar ke pasar internasional merupakan salah satu tujuan perusahaan untuk meluaskan pasar produknya. Memasuki pasar internasional bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan perusahaan apalagi UKM tanpa mengetahui informasi pasar saat itu. Dalam hal ini, DISKOPERINDAG Kota Batu perlu mendukung para pelaku UKM untuk dipromosikan pada pasar internasional. Dukungan pemerintah pada ekspansi produk UKM Kota Batu di pasar internasional dijelaskan oleh Kepala Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Bidang Industri Kota Batu:

“Iya, DISKOPERINDAG memberikan bantuan bagi UKM yang akan melakukan ekspor. Kami memberikan fasilitas dengan memberikan informasi jika ada pameran internasional. Tiap tahun Provinsi Jawa Timur mengadakan *International Handicraft* (INACRAFT), acara ini diadakan di Jakarta pada bulan April. Kita memberikan fasilitas dengan menyewakan stan untuk UKM yang ingin mengikuti acara tersebut.”

Pemapanan yang diberikan Bapak Danang adalah Pemerintah Kota Batu memberikan dukungan bagi UKM yang akan melakukan ekspor dengan memberikan informasi mengenai acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi. Adanya dukungan informasi maka Pemerintah Kota Batu dalam hal ini sangat mendukung UKM di Kota Batu dalam memperluas produknya untuk dikenal oleh negara asing. Hal ini mempermudah para pelaku UKM untuk meningkatkan potensi UKM di pasar internasional.

g. Pelatihan Kewirausahaan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal terpenting dalam membangun usahanya serta meningkatkan produksifitasnya. Perusahaan sangat memerlukan sumber daya manusia yang bagus dalam membantu meningkatkan usaha dan membuat inovasi pada produknya agar digemari oleh masyarakat. Mengembangkan pengetahuan sumber daya manusia, *skills*, serta semangat kewirausahaan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Pemerintah Kota Batu sangat memahami kebutuhan UKM pada sumber daya manusia yang baik, sehingga Pemerintah Kota Batu menyadari bahwa dengan membantu melakukan pelatihan bagi sumber

daya manusia di Kota Batu membantu mereka untuk mengembangkan usahanya. Kebijakan pelatihan kewirausahaan yang diberikan Pemerintah dipaparkan oleh Bapak Rahman Saffi'i Kepala Bidang Usaha Mikro Industri Kecil dan Menengah Kota Batu sebagai berikut:

“Pemerintah Kota Batu memberikan program pelatihan kewirausahaan kepada UKM biasanya dua kali dalam setahun. Pelatihan ini melatih UKM untuk menciptakan produk baru, meningkatkan pengetahuan tentang pasar dan produk, serta pelatihan teknik produksi dan pengolahan yang baik. Kita juga melayani jika suatu kelompok ingin ada pelatihan maka mereka dapat mendaftar di PLUT kemudian nanti PLUT akan menjadwalkan mereka untuk mengikuti pelatihan. Dalam hal program promosi untuk UKM yang akan ekspor, kami belum punya. Kami hanya masih dalam bentuk melayani promosi dalam negeri belum sampai ekspor.”



Gambar 4.5. Pelatihan Kewirausahaan Pemerintah Kota Batu

Sumber : PLUT (2017)

Program pelatihan kewirausahaan yang diadakan Pemerintah Kota Batu memfasilitasi tempat di PLUT Kota Batu. PLUT Kota Batu membuat jadwal pelatihan untuk para pelaku UKM, selain itu PLUT menyediakan narasumber dalam pelatihan tersebut. Program pelatihan kewirausahaan yang diberikan Pemerintah Kota Batu adalah pelatihan kewirausahaan, pelatihan sosialisasi dan produksi, pelatihan sumber daya manusia, dan praktek serta pendampingan dalam pelatihan.

h. Representasi yang Lebih Efektif untuk Kepentingan UKM

Pemerintah dan UKM memerlukan wadah atau asosiasi untuk saling berhubungan. Wadah ini menjadi tempat untuk berkumpulnya para pelaku usaha agar saling bertukar pikiran dalam mengembangkan usahanya. Informan pertama peneliti yaitu Bapak Rahman Syafi'i sebagai Kepala Bidang Usaha Mikro Industri Kecil dan Menengah Kota Batu menjelaskan bahwa Kota Batu memiliki asosiasi yang disebut Asosiasi Pengusaha Kota Batu (APKB). Asosiasi ini beranggotakan para pelaku usaha UKM di Kota Batu.

Asosiasi Pengusaha Kota Batu (APKB) didirikan Pemerintah Kota Batu untuk mewadahi segala yang berhubungan dengan keberlangsungan pelaku UKM dengan Pemerintah Kota Batu. APKB menjadi tempat para pelaku UKM berbagi ilmu yang dimiliki dan perkembangan usaha yang dimiliki. Asosiasi ini membantu Pemerintah dalam memahami kesulitan serta kemudahan yang diterima oleh pelaku UKM dalam membangun dan mengembangkan usaha yang

dimiliki. Adanya asosiasi APKB memberikan kemudahan Pemerintah dan pelaku UKM dalam dengan baik.

Peneliti dalam mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan daya saing UKM di Kota Batu selain melakukan wawancara, peneliti memberikan angket kepada kepala dan staff DISKOPERINDAG Kota Batu. Angket dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa besar pengaruh kebijakan pengembangan UKM dalam meningkatkan daya saing UKM Kota Batu di pasar global. Selain itu, angket ini berguna dalam mengetahui nilai kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Batu dalam pengembangan UKM di Kota Batu.

Angket dalam penelitian ini berisi delapan indikator yang ditetapkan oleh ERIA (2008:6), delapan indikator memiliki tujuan yang dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Kerangka Kelembagaan, indikator ini merujuk kepada kelembagaan yang didirikan oleh Pemerintah Kota Batu untuk membantu dalam mengembangkan UKM di Kota Batu;

BAGIAN I
INSTITUTIONAL FRAMEWORK

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Pemerintah melalui Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian Perdagangan, BAPPEDA, dan atau Dinas lainnya yang terkait selalu berkoordinasi dengan baik dan berkelanjutan untuk bersama-sama mengembangkan UMKM					
2	Pemerintah mempunyai peraturan daerah atau peraturan wakikota yang khusus mengatur tentang pengembangan UMKM					
3	Pemerintah telah menerapkan kebijakan pengembangan UMKM dengan baik dan transparan.					
4	Pemerintah melakukan pendampingan dan advokasi bagi pelaku usaha informal (mikro) yang berpotensi untuk menjadi pelaku usaha formal (kecil dan menengah)					

Gambar 4.6. Angket Bagian 1 : Kerangka Kelembagaan

Sumber: Data diolah

- (2) Layanan Dukungan, indikator ini untuk mengetahui seberapa besar dukungan Pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan UKM Kota Batu serta fasilitas – fasilitas yang diberikan Pemerintah untuk pengembangan UKM Kota Batu;

BAGIAN II
ACCESS TO SUPPORT SERVICE

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
		5	4	3	2	1
Dukungan pelayanan terpadu bagi UMKM						
1	Pemerintah selalu memberikan pelayanan terpadu dalam memfasilitasi UMKM untuk mengembangkan usahanya					
Dukungan Promosi Melalui E-Services atau Oline						
1	Pemerintah telah memfasilitasi UMKM dalam melakukan E- Commerce (perdagangan online)					
2	Pemerintah telah menerapkan E- Government (layanan online) bagi UMKM					
3	Pemerintah memberikan fasilitas serta informasi berupa portal online khusus bagi UMKM untuk mempromosikan UMKM di Kota Malang.					

Gambar 4.7. Angket Bagian 2 : Layanan Dukungan

Sumber: Data diolah

- (3) Layanan Murah dan Cepat bagi Pelaku *Start-up* serta Perbaikan Regulasi, indikator ini merujuk pada bagaimana pelayanan Pemerintah Kota Batu dalam melayani usaha baru serta apakah regulasi Pemerintah sudah diperbaiki dalam kemudahan UKM untuk pengembangan UKM;

BAGIAN III
CHEAPER AND FASTER START-UP AND BETTER LEGISLATION AND REGULATION

No	Percyataan	SS	S	R	TS	STS
		5	4	3	2	1
Layanan murah dan cepat bagi pelaku <i>Start-Up</i>						
1	Pemerintah secara transparan memberikan informasi mekanisme penerbitan sertifikat usaha (jangka waktu pembuatan, syarat yang diperlukan, biaya, dan yang terkait lainnya) bagi pelaku usaha <i>Start-Up</i> .					
2	Pemerintah melakukan pendampingan pada semua tahap pendaftaran sebagaimana di atas hingga memasuki tahap operasional usaha.					
3	Pemerintah menyediakan layanan <i>one-stop-shop</i> (layanan satu atap) untuk pelaku <i>start-up</i> yang akan melakukan registrasi usaha					
4	Pemerintah menyediakan pendaftaran secara online.					
5	Pemerintah menyediakan bantuan finansial untuk mendukung usaha <i>start-up</i> (pinjaman lunak, voucher, hibah, dll)					
Perbaikan Pada Formalisasi dan Peraturan						
1	Pemerintah melibatkan pelaku UMKM untuk membuat maupun evaluasi peraturan khususnya terkait dengan usaha <i>start up</i>					
2	Pemerintah secara berkala mengevaluasi peraturan yang telah berlaku.					

Gambar 4.8. Angket Bagian 3 : Layanan Murah dan Cepat bagi Pelaku *Start-up* serta Perbaikan Regulasi

Sumber: Data diolah

- (4) Akses Keuangan, indikator ini merujuk kepada bagaimana Pemerintah mempermudah UKM Kota Batu dalam pemimjaman modal dan peraturan yang berhubungan dengan keuangan;

**BAGIAN IV
ACCESS TO FINANCE**

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
		5	4	3	2	1
Kerangka Hukum dan Peraturan						
1	Pemerintah memberikan kuasa kepada UMKM untuk memanfaatkan lahan kosong milik pemerintah agar dapat digunakan sebagai pusat kegiatan usaha produktif (kadastre).					
2	Pemerintah memberikan solusi atas pemenuhan agunan bagi UMKM potensial yang akan mengakses permodalan di lembaga keuangan namun tidak memiliki aset					
3	Pemerintah memberikan solusi atas pemenuhan kebutuhan administratif (legalitas) bagi UMKM potensial yang akan mengakses permodalan di lembaga keuangan					
Kemudahan akses permodalan						
1	Pemerintah memfasilitasi UMKM dalam mengakses pinjaman mikro ke lembaga keuangan (perbankan)					
2	Pemerintah memfasilitasi UMKM dalam mengakses pinjaman mikro ke lembaga non keuangan (CSR perusahaan, hibah, dll)					

Gambar 4.9. Angket Bagian 4 : Akses Keuangan

Sumber: Data diolah

- (5) Teknologi dan Transfer Teknologi; indikator ini untuk mengetahui bagaimana Pemerintah dalam memberikan bantuan sarana teknologi dan pelatihan teknologi bagi UKM;

BAGIAN V
TECHNOLOGY AND TECHNOLOGY TRANSFER

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
		5	4	3	2	1
Dukungan Penyebaran Informasi Teknologi						
1	Pemerintah mempunyai kebijakan strategis/khusus terkait dengan peningkatan inovasi bagi UMKM.					
2	Pemerintah memberikan informasi yang luas kepada UMKM terkait dengan perkembangan teknologi dan inovasi dalam pengembangan produk UMKM.					
Membantu Perkembangan Kerjasama dalam Bidang Teknologi						
1	Pemerintah mempunyai inkubator bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan inovasi dan kreatifitas usahanya					
2	Pemerintah memberi bantuan berupa sertifikasi usaha (halal, depkes, merk, paten dll) bagi pelaku UMKM					
3	Pemerintah telah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam pengembangan inovasi dan penerapan teknologi tepat guna bagi UMKM					
4	Pemerintah mendampingi pelaku UMKM untuk mendapatkan HAKI					
5	Pemerintah menjamin perlindungan HAKI yang dimiliki pelaku UMKM					
Sistem Kluster dan Jaringan Bisnis						
1	Pemerintah memfasilitasi pelaku UMKM yang memiliki usaha sejenis untuk membentuk kluster usaha					
2	Pemerintah mendampingi pembentukan kluster usaha hingga memiliki daya saing yang kuat					
Pengembangan Keuangan dan Teknologi						
1	Pemerintah memberikan pelatihan ataupun pendampingan pada UMKM untuk mengembangkan sistem keuangan yang profesional.					
2	Pemerintah memberikan insentif khusus bagi UMKM yang mampu mengembangkan usahanya berbasis riset					

Gambar 4.10. Angket Bagian 5 : Pelatihan Kewirausahaan
Sumber: Data diolah

- (6) Ekspansi Pasar Internasional, indikator ini untuk mengetahui apakah Pemerintah Kota Batu mempunyai program khusus untuk membantu UKM Kota Batu dalam memperluas pangsa pasarnya di pasar Internasional;

BAGIAN VI
INTERNATIONAL MARKET EXPANSION

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Pemerintah mempunyai program khusus (pameran internasional, expo, promosi online, dll) yang mendukung UMKM melakukan aktivitas ekspor.					
2	Pemerintah selalu memberikan informasi pasar internasional potensial bagi pelaku UMKM yang telah, sedang, atau akan melakukan aktivitas ekspor					
3	Pemerintah menjalin kerjasama dengan kedutaan-kedutaan negara lain untuk memasarkan produk UMKM di negara lain					
4	Pemerintah memberikan fasilitas (training, <i>capacity building</i> , <i>workshop</i> , seminar, dll) bagi pelaku UMKM dalam melakukan aktivitas ekspor.					
5	Pemerintah memberikan dukungan finansial bagi UMKM untuk melakukan aktivitas ekspor.					
6	Pemerintah memfasilitasi pelaku ekspor dari UMKM dalam kemudahan akses finansial ke lembaga keuangan					
7	Pemerintah memberikan insentif khusus (pengurangan Biaya Perizinan, Bea Cukai, dll) bagi pelaku UMKM yang melakukan aktivitas ekspor.					

Gambar 4.11. Angket Bagian 6 : Ekspansi Pasar Internasional

Sumber: Data diolah

- (7) Pelatihan Kewirausahaan, indikator ini untuk mengetahui apakah Pemerintah Kota Batu mempunyai pelayanan pelatihan kewirausahaan bagi UKM Kota Batu serta apakah pelatihan kewirausahaan yang diberikan Pemerintah Kota Batu dapat berjalan dengan baik dalam pengembangan UKM Kota Batu;

BAGIAN VII
PROMOTION ON ENTERPRENEURIAL EDUCATION

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Pemerintah mempunyai kebijakan khusus yang mendukung pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat					
2	Pemerintah telah memasukkan pendidikan kewirausahaan sebagai kurikulum formal dalam sistem pendidikan baik pada level pendidikan dasar, menengah, maupun atas)					
3	Pemerintah berkolaborasi dengan instansi pendidikan untuk untuk menjadi fasilitator penerapan pendidikan kewirausahaan pada level pendidikan SD, SMP, hingga SMA)					
4	Pemerintah menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk memberikan edukasi kewirausahaan bagi masyarakat					
5	Pemerintah menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan non formal dan atau komunitas kewirausahaan untuk memberikan edukasi kewirausahaan bagi masyarakat					

Gambar 4.12. Angket Bagian 7 : Pelatihan Kewirausahaan
Sumber: Data diolah

- (8) Representasi yang Lebih Efektif untuk Kepentingan UKM, Indikator ini merujuk kepada seberapa efektif adanya asosiasi yang didirikan Pemerintah Kota Batu bagi UKM Kota Batu, apakah Pemerintah Kota Batu masih memiliki hubungan yang berkelanjutan dengan asosiasi UKM, dan adanya asosiasi UKM dapat mempengaruhi kebijakan UKM di Kota Batu.

BAGIAN VIII
MORE EFFECTIVE REPRESENTATION OF SMALL ENTERPRISES'
INTERESTS

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
		5	4	3	2	1
Peran dan Kapasitas Asosiasi UMKM						
1	Pemerintah menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga/asosiasi (Klinik UMKM, KADIN, BDS, dll) yang fokus dalam pendampingan usaha UMKM					
2	Lembaga/asosiasi tersebut memiliki kapasitas dalam mendampingi usaha bagi pelaku UMKM					
3	Lembaga/asosiasi tersebut telah memberikan pendampingan teknis usaha (manajemen keuangan, SDM, pemasaran, distribusi, produksi, dll) bagi pelaku UMKM					
4	Lembaga/asosiasi tersebut telah memberikan pelatihan/workshop yang mendukung peningkatan kapasitas pengetahuan dan ketrampilan bagi pelaku UMKM					
5	Lembaga/asosiasi tersebut memiliki kapasitas dalam pengembangan riset inovasi dan teknologi yang mendukung pengembangan usaha UMKM					
Peran asosiasi dalam mempengaruhi kebijakan UMKM						
1	Pemerintah selalu melibatkan asosiasi dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan UMKM					
2	Asosiasi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait tentang pengembangan UMKM					

Gambar 4.13. Angket Bagian 8 : Efektifitas Asosiasi Bagi UKM
Sumber: Data diolah

Angket *SME Development Index* dengan delapan indikator tersebut berfungsi sebagai petunjuk bagi peneliti dalam menjelaskan implementasi kebijakan pengembangan daya saing global UKM di Kota Batu. Sehingga hasil dari angket mempermudah peneliti memberikan penilaian dalam menganalisis data yang peneliti dapatkan.

3. Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah Tentang Kebijakan Pengembangan Daya Saing UKM di Kota Batu Pada Pasar Global

Kebijakan pengembangan daya saing global UKM di Kota Batu ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi UKM Kota Batu. Adanya kebijakan pengembangan daya saing global UKM di Kota Batu memberikan persepsi sendiri bagi pelaku UKM. Persepsi pelaku UKM

merupakan bentuk dari hasil kinerja kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan UKM di Kota Batu. Dalam memberikan persepsi pelaku UKM Kota Batu untuk kebijakan pengembangan daya saing global UKM, peneliti menggunakan *SME Development Index* sebagai acuan dalam menganalisa. *SME Development Index* terdapat delapan indikator (ERIA, 2008:6), yaitu kerangka kelembagaan, layanan dukungan, layanan murah dan cepat bagi pelaku *start-up* serta perbaikan regulasi, akses keuangan, teknologi dan transfer teknologi, ekspansi pasar internasional, pelatihan kewirausahaan, dan representasi yang lebih efektif untuk kepentingan UKM.

Arjuna 999 merupakan usaha yang dimiliki oleh Ibu Hari Mastutik memproduksi produk keripik tempe, keripik buah, dan rempeyek. Arjuna 999 memasarkan produk keripiknya di pasar lokal serta pasar internasional dengan mengekspor ke Negara Taiwan dan Negara Hongkong. Sedangkan Arjuna Flora merupakan usaha yang dimiliki oleh Ir. Luki Budiarti memproduksi produk botol plastik. Arjuna Flora memasarkan produk botol plastik di pasar internasional dengan mengekspor ke Negara Jepang. Atas dasar hal tersebut, untuk menjawab fokus penelitian yang ketiga, peneliti memberikan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh pelaku UKM berorientasi ekspor yaitu, Ibu Hari Mastutik pemilik Arjuna 999 dan Ibu Ir. Luki Budiarti pemilik Arjuna Flora.

1. Kerangka Kelembagaan

Kebijakan kelembagaan merupakan kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah bagi kemudahan UKM dalam berkoordinasi dengan Pemerintah untuk mengembangkan UKM di suatu daerah. Kebijakan ini berfungsi untuk membantu dalam menyelesaikan masalah – masalah formal dan informal UKM. Persepsi pelaku UKM Kota Batu mengenai kebijakan kelembagaan dijelaskan Ibu Hari Mastutik sebagai pemilik Arjuna 999 pada tanggal 14 Februari 2017 pukul 12.10 WIB adalah sebagai berikut:

”Menurut saya Pemerintah Kota Batu sudah memberikan hubungan yang baik kepada UKM. Pemerintah juga memberikan pendampingan bagi pelaku UKM usaha mikro untuk menjadi usaha kecil dan menengah. Selain itu, Pemerintah memberikan koordinasi yang baik dengan pelaku UKM untuk mengembangkan UKM di Kota Batu. Sehingga Pemerintah dan pelaku UKM memiliki hubungan yang baik satu sama lain.”

Persepsi kebijakan kelembagaan yang baik antara Pemerintah dan pelaku UKM dalam mengembangkan UKM Kota Batu juga memiliki pernyataan sama oleh Ibu Luki Budiarti pada tanggal 17 Februari 2017 pukul 10.45 WIB, bahwa:

“Koordinasi Pemerintah dengan para pelaku UKM di Kota Batu sudah sangat baik. Saya setuju dengan Pemerintah menerapkan kebijakan ini sesuai dan transparan sehingga kami para pelaku UKM dapat bekerja sama dengan Pemerintah untuk bersama – sama dalam mengembangkan UKM di Kota Batu terutama pada pasar ekspor.”

Pernyataan dari Ibu Hari Mastutik dan Ibu Luki Budiarti menjelaskan bahwa keduanya memiliki persepsi yang sama.

Pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan yang baik dan transparansi bagi UKM di Kota Batu. Selain itu, Pemerintah selalu berkoordinasi sangat baik dengan pelaku UKM di Kota Batu dalam mengembangkan UKM yang ada di Kota Batu.

2. Layanan Dukungan

Pemerintah perlu memberikan pelayanan dukungan kepada pelaku UKM agar dapat mengembangkan usahanya. Adanya kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik serta dukungan bagi UKM di Kota Batu. Kedua informan peneliti Ibu Hari Mastutik dan Ibu Luki Budiarti memberikan persepsi yang sama mengenai kebijakan layanan dukungan Pemerintah. Pemerintah Kota Batu memberikan pelayanan terpadu dalam memfasilitasi UKM untuk mengembangkan usahanya. Pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Batu mempermudah pelaku UKM untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan UKMnya. Selain itu, pelaku UKM Kota Batu juga difasilitasi oleh Pemerintah dengan adanya layanan *online* dan Pemerintah memberikan fasilitas promosi bagi UKM untuk mempromosikan produk-produk hasil UKM Kota Batu.

3. Layanan Murah dan Cepat bagi Pelaku *Start-up* serta Perbaikan Regulasi

Pemilik usaha baru pada jaman modern saat ini memerlukan izin usaha untuk mendapatkan kepercayaan konsumennya terhadap perusahaan yang dibangun. Izin usaha ini digunakan oleh para pemilik

usaha baru selain agar mendapat kepercayaan konsumen juga untuk mendapatkan izin edar produk dan perlindungan dari Pemerintah.

Informan pertama peneliti Ibu Hari Mastutik menjelaskan bahwa beliau menyetujui adanya layanan yang cepat dan murah untuk usaha baru. Begitu pula Ibu Luki Budiarti memaparkan bahwa langkah Pemerintah dalam menerapkan layanan tersebut memberi kemudahan bagi pemilik usaha baru. Selain itu, regulasi yang dimiliki Pemerintah baik Ibu Hari dan Ibu Luki menjelaskan bahwa sudah banyak perbaikan. Berikut merupakan pemaparan dari kedua informan:

“Saat ini Pemerintah memiliki layanan yang baik bagi pemilik usaha baru ataupun usaha lama yang belum memiliki izin usaha. Mereka memberikan kemudahan bagi kami, semua biaya untuk menerbitkan izin usaha sudah tidak ada jadi sudah gratis. Pemerintah memberikan informasi yang baik bagaimana menerbitkan izin usaha bagi pemilik usaha. Pemerintah Kota Batu juga melakukan pendampingan bagi UKM saat melakukan pendaftaran, hampir disemua tahap dijelaskan mekanismenya. Regulasi Pemerintah sendiri menurut saya sudah banyak perbaikan.” Ibu Hari Martutik, Arjuna 99.

Hal serupa juga dijelaskan oleh pemilik Arjuna Flora, Ibu Luki Budiarti, beliau juga menyinggung mengenai regulasi Pemerintah Kota Batu dan layanan yang baik.

“Regulasi Pemerintah sendiri saat ini di Kota Batu sudah sering dievaluasi untuk kebaikan UKM di Kota Batu. Peraturan di Kota Batu lebih banyak mendukung pengembangan UKM Kota Batu. Apalagi membuat peraturan untuk kemudahan usaha baru juga kadang berkoordinasi. Saat ini juga sudah ada kemudahan dukungan finansial seperti pinjaman lunak bagi UKM.” (Pemilik Arjuna Flora)

4. Akses Keuangan

Permodalan merupakan salah satu alat vital bagi pengembangan UKM. Kemudahan dalam peminjaman keuangan akan lebih meringankan UKM pada akses permodalan usahanya. Kedua pemilik UKM berorientasi ekspor Arjuna 99 dan Arjuna Flora menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Batu memiliki peraturan yang memberikan solusi ketika UKM memerlukan kemudahan dalam mengakses permodalan di lembaga keuangan. Kemudahan akses keuangan juga diberikan Pemerintah Kota Batu dengan adanya akses pinjaman ke lembaga non keuangan seperti adanya hibah yang diberikan Pemerintah kepada UKM. Ibu Hari Masturik pemilik Arjuna 999 kemudian menambahkan pernyataannya sebagai berikut:

“Untuk akses keuangan seperti peraturan dan kemudahan peminjaman, sangat diberi kemudahan sama Pemerintah Kota Batu. Namun, pemberian kuasa atas lahan kosong untuk dipergunakan atau dimanfaatkan oleh kegiatan UKM *sih* masih belum ya. Jadi lebih ke kemudahan peraturan permodalan saja menurut saya.”

5. Teknologi dan Transfer Teknologi

“Pemerintah dalam hal pengembangan teknologi sudah baik, mereka memberikan informasi mengenai pengembangan teknologi dan inovasi pada pengembangan produk UKM Kota Batu. Pemerintah Kota Batu juga memfasilitasi kami dalam pemberian label halal, uji nutrisi, dan merk pada produk dari hasil UKM. Pemerintah juga melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam penerapan teknologi dan pengembangan inovasi UKM.” Ibu Hari Mastutik, Arjuna 999.

Peningkatan dalam penggunaan teknologi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan UKM Kota Batu. Teknologi dimanfaatkan perusahaan untuk mengembangkan inovasi serta kreativitas dalam usahanya. Selain itu, Beliau juga menambahkan bahwa bantuan Pemerintah dalam hal pelatihan UKM untuk mengembangkan sistem keuangan. Pemilik Arjuna Flora, Ibu Luki Budiarti memiliki persepsi yang sama mengenai teknologi dan transfer teknologi. Beliau menambahkan bahwa Pemerintah mendampingi pelaku UKM yang memiliki usaha sejenis untuk berhubungan agar dapat berbagi ilmu dalam hal pengembangan usahanya.

6. Ekspansi Pasar Internasional

Pasar internasional merupakan tujuan para pelaku usaha dalam memasarkan produknya selain pasar lokal. Hal ini karena pasar internasional dapat meningkatkan penjualan produk dan meluaskan pangsa pasar usaha. Usaha besar maupun UKM berusaha untuk mencapai pasar internasional agar para pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya. Dalam meluaskan usahanya perlu adanya dukungan dari Pemerintah untuk mengetahui kondisi pasar internasional saat ini. Pemilik arjuna 999, Ibu Hari Mastutik menjelaskan bahwa Pemerintah memiliki program khusus untuk melakukan ekspor di pasar internasional, berikut penjelasan beliau:

“Untuk ekspor sendiri ada pameran khusus untuk produk siap ekspor dari Pemerintah, UKM di Kota Batu mempunyai produk yang berinovasi dan siap ekspor seperti ada produk

keripik buah dan sayur sehingga perlu adanya pameran untuk mempromosikannya. Kemudian Pemerintah juga mendukung UKM dengan adanya finansial yang mudah untuk melakukan aktivitas ekspor tersebut.”

Informan kedua peneliti pemilik Arjuna Flora, Ibu Luki Budiarti menjabarkan persepsinya tentang kebijakan ekspansi pasar internasional sebagai berikut:

” Kalau untuk ekspor Pemerintah juga memberikan informasi tentang pasar potensial mana yang sesuai dengan produk yang dihasilkan oleh UKM. Kemudian juga ada pelatihan agar pelaku UKM dapat melakukan aktivitas ekspor. Menurut saya, untuk kegiatan ekspor Pemerintah mendukung penuh dengan pemberian fasilitas-fasilitas agar para pelaku UKM dapat mengembangkan pemasarannya ke pasar internasional dengan mengekspor.”

Kedua informan peneliti memberikan persepsi yang sama mengenai kebijakan yang diberlakukan Pemerintah untuk aktivitas ekspor para pelaku UKM. Pemerintah Kota Batu memberikan dukungan dan layanan fasilitas yang baik kepada para pelaku UKM dalam meluaskan pangsa pasar usahanya di pasar internasional. Pemerintah juga memberikan kemudahan serta dukungan finansial bagi UKM dalam melakukan aktivitas ekspor usahanya.

7. Pelatihan Kewirausahaan

Kewirausahaan merupakan tujuan Pemerintah agar mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerahnya. Sehingga Pemerintah melakukan pendidikan kewirausahaan untuk meningkatkan masyarakat agar mempunyai usaha sendiri. Kedua informan peneliti pemilik Arjuna 999 dan

pemilik Arjuna Flora memberikan persepsi yang sama tentang indikator pelatihan kewirausahaan yang diberikan Pemerintah Kota Batu. Pemilik Arjuna Flora dan Arjuna 999 menyetujui bahwa Pemerintah memberikan pendidikan kewirausahaan kepada setiap pelaku UKM.

Kedua informan yaitu Ibu Hari Mastutik dan Ibu Luki Budiarti menjelaskan bahwa Pemerintah menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam memberikan pelatihan kewirausahaan. Beliau memaparkan bahwa Pemerintah Kota Batu juga memberikan fasilitas jika pelaku UKM ingin mendapatkan pelatihan sumber daya manusia agar lebih inovasi dalam menghasilkan produk maka Pemerintah akan memberikan jadwal pendidikan kepada para pelaku UKM. Adanya pelatihan kewirausahaan dari Pemerintah membantu para pelaku UKM untuk lebih memahami kewirausahaan agar dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan pengetahuan kepada sumber daya manusia.

8. Representasi yang Lebih Efektif untuk Kepentingan UKM

“Ada asosiasi UKM di Kota Batu, yaitu Asosiasi Pengusaha Kota Batu (APKB). Di asosiasi tersebut Pemerintah mendampingi pelaku UKM dalam mengembangkan usaha kami. Asosiasi ini menurut saya menjadi wadah kami para pelaku UKM dan Pemerintah untuk saling berhubungan sehingga kita dapat berbagi segala yang berhubungan dengan UKM.” Ibu Luki Budiarti, Arjuna Flora.

Persepsi berbeda diberikan oleh Ibu Hari Mastutik pemilik Arjuna 999, beliau menjelaskan bahwa asosiasi Pemerintah memberikan

pelatihan yang mendukung peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi para pelaku UKM. Namun, asosiasi ini masih belum maksimal dalam melakukan pendampingan pada teknik usaha seperti manajemen keuangan, pemasaran, produksi dan distribusi bagi pelaku UKM. Pengembangan usaha UKM masih belum maksimal dalam pengembangan riset dan teknologi. Asosiasi Pemerintah juga masih belum maksimal untuk fokus dalam mendampingi pelaku UKM mengembangkan usaha.

Persepsi pelaku UKM terhadap kebijakan pengembangan daya saing global UKM selain melakukan wawancara, peneliti juga memberikan angket kepada kedua informan yaitu Ibu Hari Mastutik pemilik Arjuna 999 dan Ibu Luki Budiarti pemilik Arjuna Flora. Dalam angket yang peneliti bagikan digunakan untuk mengukur seberapa besar kebijakan berlaku di UKM. Dalam mengukur kebijakan pengembangan daya saing global UKM, peneliti menggunakan indikator dari *SME Development Index* untuk mempermudah mendapatkan skor.

NO.	Variabel	1	2	3	4	5	6
		SBU	BU	ABU	ABA	BA	SBA
1	Regulasi Pemerintah						
	a. Kemudahan prosedur pendaftaran bagi bisnis UKM baru						
	b. Peraturan yang efektif untuk peningkatan daya saing UKM						
	c. Pajak yang sesuai dengan badan usaha						
2	Akses Keuangan						
	a. Kemudahan prosedur pinjaman keuangan						
3	Layanan Dukungan						
	a. Adanya lembaga atau wadah hubungan pemerintah dan pelaku						
	b. Adanya bantuan transfer						
	c. Dukungan peningkatan teknologi untuk produksi dan pengolahan						
4	Teknologi dan Tranfer Teknologi						
	a. Adanya kerjasama teknologi untuk mengembangkan <i>Research and Development</i>						
	b. Adanya insentif keuangan untuk pengembangan teknologi melalui retrobusi						
5	Ekspansi Pasar Internasional						
	a. Bantuan strategi promosi produk di Pasar Internasional						
	b. Adanya bantuan informasi dalam memasuki pasar internasional						
	c. Kemudahan finansial untuk pengembangan usaha bisnis ke Pasar Internasional						
6	Pendidikan Kewirausahaan						
	a. Adanya bantuan pelatihan kewirausahaan						
	b. Pelatihan untuk keahlian sumber daya manusia						
	c. Pelatihan tentang teknologi produksi dan pengembangan perusahaan						

Gambar 4.14. Angket Pelaku UKM Kota Batu
 Sumber: Data diolah

Angket pelaku UKM Kota Batu digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan nilai persepsi pelaku UKM terhadap kebijakan pengembangan daya saing global UKM di Kota Batu. Hasil penilaian persepsi dari pelaku UKM berguna untuk memberi nilai kebijakan agar mampu mendorong pengembangan UKM di Kota Batu dalam aktivitas ekspor. Selain itu, hasil penilaian pelaku UKM juga digunakan untuk

melihat daya saing global UKM terhadap kebijakan yang dirancang Pemerintah Kota Batu.

C. Analisis dan Interpretasi

1. Kontribusi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berorientasi Ekspor Terhadap Ekonomi Lokal di Kota Batu

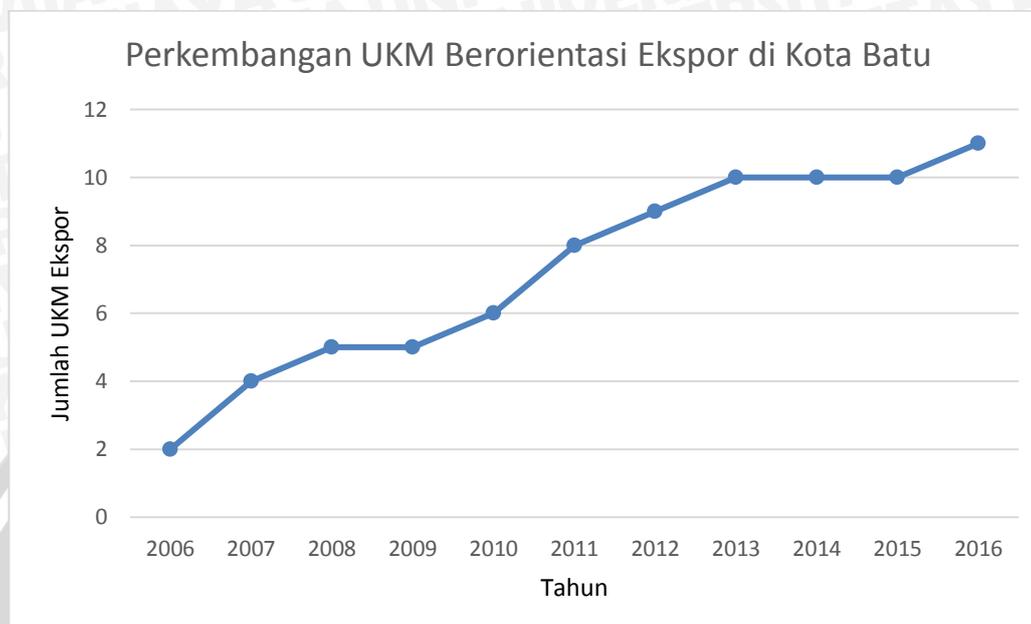
Dunia usaha saat ini khususnya UKM sangat membantu negara dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara. Adanya UKM dalam sebuah negara baik negara berkembang maupun negara maju akan memberi dampak yang baik bagi pembangunan negara tersebut. Negara Indonesia adalah salah satu yang memiliki banyak UKM. Banyaknya UKM pada negara Indonesia memberikan kontribusi yang baik pada bidang perekonomiannya. UKM di Kota Batu merupakan salah satu usaha yang banyak dimiliki masyarakatnya. Adanya UKM di Kota Batu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal. Menurut Koran Surya (2013) bahwa sektor UKM membantu perekonomian Kota Batu sekitar 42%. Hal ini menandakan bahwa sektor UKM memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian.

UKM di Kota Batu juga memiliki usaha yang berorientasi ekspor, UKM ini terdapat 11 usaha. Jumlah UKM berorientasi ekspor memberikan tambahan pada sektor perekonomian di Kota Batu, sehingga kontribusi terhadap ekonomi lokal akan meningkat. Atas dasar hal tersebut, untuk menjawab fokus penelitian yang pertama mengenai kontribusi UKM berorientasi ekspor terhadap perekonomian lokal. Peneliti memberikan

beberapa item pertanyaan yang dijawab oleh dua orang informan, Bapak Rahman Safi'i selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Industri Kecil dan Menengah serta Bapak Herwindra Danang selaku Kepala Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Bidang Industri Kota Batu. Jawaban dari *item* pertanyaan pada fokus penelitian pertama telah disertakan pada bagian penyajian data. Berikut adalah pembahasan jawaban penelitian.

Adanya perkembangan pada UKM berorientasi ekspor akan memberikan kontribusi pada perekonomian lokal. Perkembangan UKM Kota Batu berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi Kota Batu. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari dua informan, dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal, dapat dijelaskan secara rinci pada penjelasan berikut ini.

UKM Kota Batu saat ini memiliki sekitar 14.570 usaha di Kota Batu, sedangkan UKM berorientasi ekspor sekitar 11 usaha. Pemerintah Kota Batu memberikan dukungan pada peningkatan perkembangan UKM di Kota batu dalam rangka meningkatkan daya saing usahanya. Pemerintah sadar jika ada peningkatan daya saing maka UKM akan memberikan kontribusi yang besar pula kepada daerah. Perkembangan UKM berorientasi ekspor di Kota Batu meningkat walaupun tidak terlalu signifikan. Namun, perkembangan UKM berorientasi ekspor menurut informan penelitian ini cukup memberikan kontribusi bagi Kota Batu. Perkembangan UKM berorientasi ekspor peneliti jelaskan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Perkembangan UKM Berorientasi Ekspor di Kota Batu

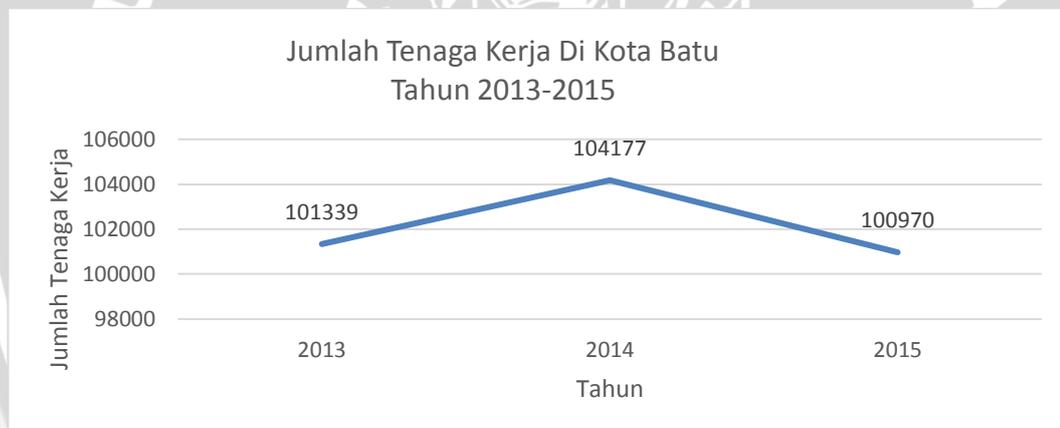
Sumber : Data diolah

Pada Tabel 4.4. tergambar bahwa ada perkembangan UKM berorientasi ekspor di Kota Batu hampir setiap tahun. Perkembangan ini berdasarkan Kepala Bidang Usaha Mikro Industri Kecil dan Menengah Bapak Rahman Safi'i dan Kepala Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Bidang Industri Kota Batu Bapak Herwindra Danang meningkatkan kontribusi dengan adanya UKM berorientasi ekspor. Kontribusi UKM Kota Batu mendukung teori dari Agustina (2015:6) terhadap perekonomian, yaitu memberikan efek positif terhadap masalah-masalah ekonomi dan sosial, berupa tingginya tingkat kemiskinan, besarnya pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan masalah urbanisasi. Sedangkan kontribusi yang diberikan UKM berorientasi ekspor Kota Batu terhadap perekonomian lokal sebagai berikut:

1) UKM berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja di Kota Batu.

Tenaga kerja di Kota Batu menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan adanya kontribusi dari UKM. Hal itu dapat dilihat dari Tabel 4.5 yang menunjukkan tingkat penyerapan tenaga dalam skala daerah pada semua bidang usaha. Data penyerapan jumlah tenaga kerja menjelaskan bahwa adanya UKM di Kota Batu memberikan tambahan penyerapan tenaga kerja di Kota Batu dengan total dari segala usaha sebesar 100.970 orang tenaga kerja.

Tabel 4.5. Jumlah Tenaga Kerja di Kota Batu Tahun 2013-2015



Sumber : BPS Kota Batu (2016)

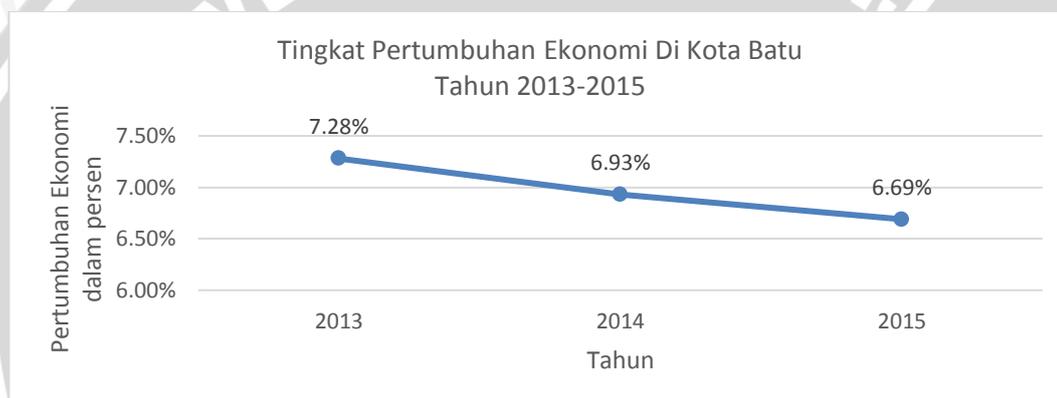
2) UKM berkontribusi meningkatkan pendapatan masyarakat di Kota Batu.

Pendapatan masyarakat meningkat secara perlahan dengan adanya Kontribusi UKM di Kota Batu. Pada Tabel 4.5 dijelaskan bahwa adanya peningkatan tenaga kerja di Kota Batu sehingga dapat disimpulkan jika dengan meningkatkan angkatan kerja yang bekerja maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Batu.

3) UKM berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Batu.

UKM memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah Kota Batu. Pertumbuhan ekonomi dari bidang UKM diterangkan pada Tabel 4.6. Pada tabel dapat dijelaskan bahwa perekonomian Kota Batu meningkat sebanyak 6,69% pada tahun 2015 secara keseluruhan bidang usaha di Kota Batu.

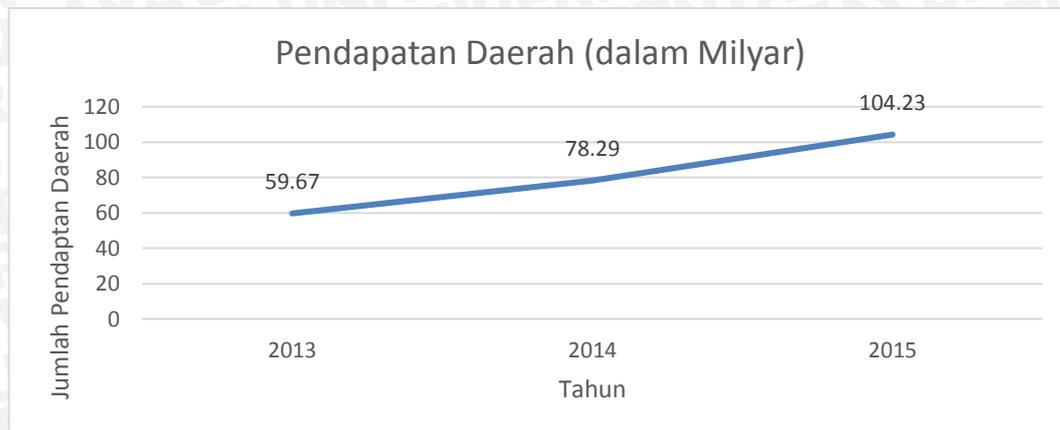
Tabel 4.6. Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batu tahun 2013-2015



Sumber : BPS Kota Batu (2016)

4) UKM berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Batu.

Pendapatan Daerah Kota Batu mengalami peningkatan pada tahun 2015. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.7, di mana jika angkatan kerja yang bekerja meningkat maka akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah di Kota Batu. Adanya kontribusi UKM memberikan peningkatan pada pendapatan daerah Kota Batu, sehingga memberikan kesejahteraan pada masyarakat di Kota Batu.

Tabel 4.7. Pendapatan Daerah di Kota Batu tahun 2013-2015

Sumber: BPS Kota Batu (2016)

5) UKM berkontribusi dalam meningkatkan produk-produk diekspor ke negara lain karena produk yang dihasilkan beragam dan berinovasi.

UKM memberikan kontribusi peningkatan jumlah produk yang diekspor ke negara lain. Produk-produk yang dihasilkan UKM akan menambah jumlah barang yang diekspor, karena semakin banyak permintaan produk dari negara lain. Adanya UKM memberikan peningkatan kontribusi pada pasar internasional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tambunan (2008) yang berjudul *SME Development in Indonesia: Do Economic Growth and Government Supports Matter?*, penelitian ini mengungkapkan bahwa kontribusi UKM secara historis menjadi pemain utama dalam kegiatan ekonomi domestik, terutama sebagai penyedia lapangan kerja yang besar, dan karenanya merupakan sumber pendapatan primer atau sekunder bagi banyak rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi UKM Kota Batu dapat dijelaskan bahwa perkembangan UKM berorientasi ekspor di Kota Batu memberikan peningkatan pada perekonomian. Walaupun perkembangan UKM berorientasi ekspor meningkat tidak terlalu signifikan tetapi tetap memberikan kontribusi yang baik bagi ekonomi lokal Kota Batu. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel diatas bahwa kontribusi dari adanya UKM di Kota Batu memberikan peningkatan di beberapa sektor seperti pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi Kota Batu.

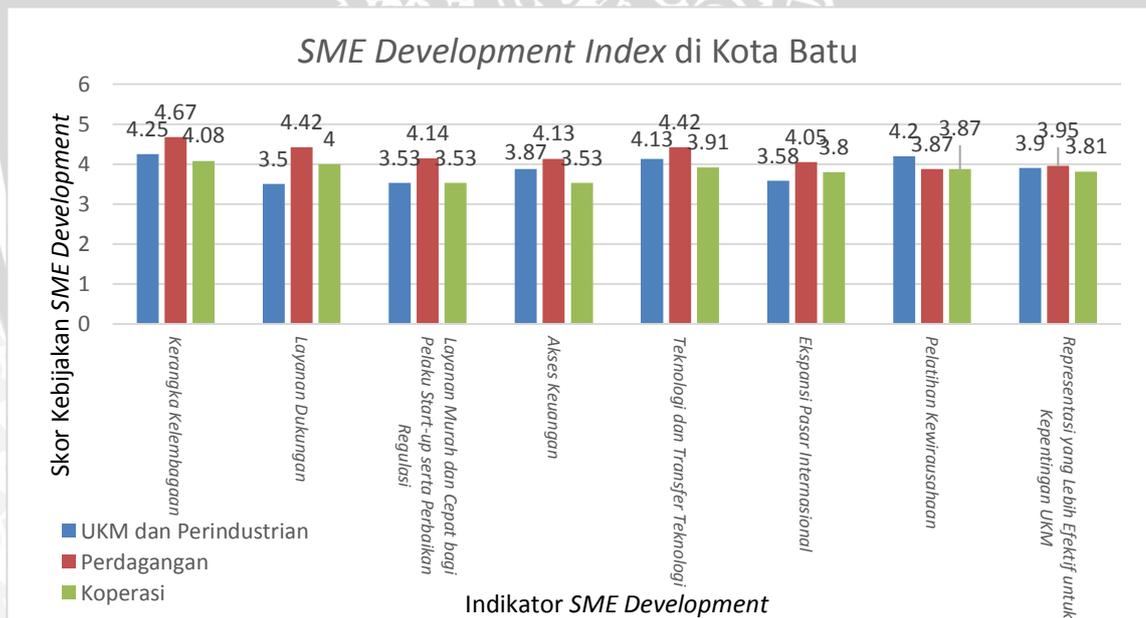
2. Implementasi Kebijakan Pengembangan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Batu Dalam Mengembangkan Daya Saing Global

Kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah Kota Batu berperan besar pada pengembangan daya saing global UKM Kota Batu. Menurut Craves (2000) dalam Bangsawan (2015:30) mengatakan bahwa memahami strategi bisnis dan keunggulan bersaing sangatlah penting untuk mengembangkan strategi pemasaran. Adanya kebijakan menandakan bahwa Pemerintah mendukung UKM Kota Batu untuk berkembang dan meningkatkan ekonomi Kota Batu. Pemerintah Kota Batu mengadakan kebijakan untuk mendorong daya saing bagi UKM Kota Batu di pasar global. Kebijakan ini juga bertujuan untuk membantu kemajuan UKM serta menambah pertumbuhan UKM. Sehingga implementasinya sangat

diperlukan untuk mengetahui kebijakan dapat berjalan sesuai dengan harapan Pemerintah dan UKM Kota Batu.

Implementasi kebijakan pengembangan daya saing global UKM Kota Batu diukur dengan menggunakan indikator *SME Development Index* dan hasil wawancara dengan Kepala Bidang UKM dan Perindustrian dan Kepala Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Bidang Industri Kota Batu. Hasil penelitian ini juga didukung dengan teori yang dijelaskan oleh ERIA (2008) mengenai *SME Development Index* beserta tabel ukurnya, sebagai berikut:

Tabel 4.8. *SME Development Index* Kota Batu



Sumber : Data diolah (2017)

1. Kerangka Kelembagaan

Implementasi kebijakan kelembagaan pada UKM Kota Batu sudah diterapkan cukup baik oleh Pemerintah Kota Batu jika dilihat pada



Tabel 4.8. Pada pengukuran implementasi kebijakan kelembagaan menjadi poin tertinggi diantara kebijakan yang lain. Sebuah lembaga diterapkan di instansi pemerintah terkait pelaksanaan strategi pengembangan UKM (ERIA, 2008:12). Teori pada ERIA memberikan pengukuran bahwa Pemerintah Kota Batu khususnya DISKOPEINDAG Kota Batu sudah melaksanakan kebijakan kelembagaan dengan baik atau belum.

Berdasarkan pemaparan kedua informan peneliti Bapak Rahman Safi'i selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Industri Kecil dan Menengah Kota Batu dan Bapak Herwindra Danang selaku Kepala Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Bidang Industri Kota Batu pada penyajian data bahwa Pemerintah selalu melakukan koordinasi dengan pelaku UKM Kota Batu. Koordinasi ini berkaitan dengan dukungan Pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah formal atau informal yang membutuhkan dan memfasilitasi konsultasi atau memberikan arahan yang sesuai dengan kebutuhan UKM Kota Batu. Hasil penelitian sesuai dengan teori ERIA (2008:14) sangat penting jika Pemerintah memastikan bahwa langkah-langkah dukungan yang diberikan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang benar-benar membutuhkannya. Pemerintah Kota Batu sudah memberikan dukungan yang sesuai untuk UKM di Kota Batu, dukungan Pemerintah dapat diartikan bahwa dirancang untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas UKM di Kota Batu. Setidaknya sekali

setiap semester Pemerintah DISKOPERINDAG Kota Batu bersama-sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), melakukan penelaahan dan evaluasi strategi untuk pengembangan daya saing UKM di Kota Batu.

2. Layanan Dukungan

Pemerintah Kota Batu memberikan pelayanan terpadu dalam memfasilitasi UKM untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dapat diartikan bahwa kerangka kebijakan untuk mendukung layanan telah dikembangkan dan diimplementasikan dengan keberhasilan medium di Kota Batu. Rencana aksi pengembangan pusat-pusat layanan usaha terpadu yang disebut PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu). Pemerintah telah membentuk jaringan pusat pengembangan bisnis one-stop shop dengan layanan yang disesuaikan untuk UKM.

UKM membutuhkan dukungan, baik dari pemerintah atau asosiasi bisnis yang relevan, untuk membantu mengembangkan UKM (ERIA, 2008:23). Teori ini sesuai dengan implementasi kebijakan layanan dukungan yang diberikan Pemerintah Kota Batu untuk mengembangkan UKM Kota Batu. Namun, berdasarkan jawaban dari angket pada DISKOPERINDAG Kota Batu, Pemerintah Kota Batu masih kurang memenuhi kebutuhan layanan UKM dalam hal *E-Government*. Pemerintah Kota Batu hanya memberikan fasilitas *E-Government* tetapi belum menerapkan secara maksimal layanan *online* bagi UKM Kota Batu.

3. Layanan Cepat dan Murah bagi Pelaku *Start-up* dan Perbaikan Regulasi

Perbaikan pelayanan proses pendaftaran bisnis dan start-up di Kota Batu sudah menjadi cepat dan murah. Saat ini di Kota Batu perizinan usaha digratiskan guna mendorong pengembangan UKM di Kota Batu. Pelayanan pembuatan izin usaha berdasarkan pemaparan Bapak Rahman Pemerintah sudah mempercepat perizinan agar lebih cepat keluar bagi pelaku UKM *start-up*. Selain itu, Pemerintah Kota Batu Pemerintah Indonesia telah memiliki *one-stop-shop* disebut Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Adanya pelayanan *one-stop-shop* bertujuan untuk menyederhanakan proses untuk pendaftaran bisnis sehingga perusahaan tidak perlu lagi mengunjungi lembaga lokal yang berbeda untuk memperoleh izin.

Berbeda dengan regulasi Pemerintah di Kota Batu, menurut pemaparan Bapak Danang tidak ada Perda khusus UKM di Kota Batu. Selain itu, Pemerintah secara berkala tidak mengevaluasi peraturan yang berlaku untuk UKM. Padahal menurut ERIA (2008:21) menyederhanakan regulasi dan membuatnya lebih transparan memiliki arti bahwa mendukung kewirausahaan yaitu pengembangan UKM Kota Batu. Kesimpulan dari regulasi di Pemerintah belum mempunyai peraturan khusus bagi UKM di Kota Batu sehingga hal ini mengurangi kesempatan pelaku UKM dalam pengembangan daya saing usahanya.

4. Akses Keuangan

Peminjaman modal bagi perusahaan saat ini sudah mulai maju dan memiliki peraturan yang mudah. Selain itu, ada agunan (aset bergerak) dan / atau persyaratan pengadaan yang fleksibel untuk pinjaman di jumlah tertentu. Di sisi lain, ada peraturan yang menjamin hak-hak kreditur dan prosedur hukum bagi pemimjam.

Sektor keuangan di Kota Batu cukup sehat dan terdiversifikasi, dengan akses keuangan untuk UKM. Fasilitas penjaminan kredit sudah ada meskipun cakupan masih terbatas pada lokasi tertentu dan jenis usaha. Pemerintah Kota Batu memiliki kerjasama dengan Bank – Bank besar untuk proses permodalan bagi pelaku UKM seperti Bank Jatim dan Bank BRI. Ada banyak lembaga yang menyediakan fasilitas keuangan mikro di Kota Batu. Lembaga keuangan yang sebagian ada di Kota Batu selain Bank seperti koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya, termasuk yang didirikan oleh badan swasta.

5. Teknologi dan Transfer Teknologi

Kota Batu yang memiliki UKM sebanyak 14.570 usaha difasilitasi adanya peningkatan teknologi untuk pengembangan UKM di Kota Batu dari Pemerintah. Dalam kebijakan ini Pemerintah Kota Batu memberikan bantuan berupa sertifikasi usaha bagi pelaku UKM Kota Batu. Berdasarkan pemaparan Bapak Rahman, Pemerintah Kota Batu memberikan bantuan sertifikasi seperti uji halal, uji nutrisi, *barcode*, merk dagang, serta ISO. Pemerintah Kota Batu juga memberikan

pendampingan pada UKM untuk mengembangkan sistem keuangannya yang professional. Namun, Pemerintah Kota Batu belum dapat memenuhi kebutuhan UKM untuk berbasis riset.

Pemerintah Kota Batu juga telah memberikan hibah masyarakat untuk mendukung kegiatan R & D dengan orientasi komersial. Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batu masih sebatas untuk kelompok usaha bersama belum mencapai usaha perorangan. Kemudian terdapat monitoring dan evaluasi sistem untuk proyek-proyek yang sedang berjalan hingga UKM Kota Batu berdaya saing kuat. Selain itu, ada kerjasama antara Pemerintah dengan Perguruan Tinggi dalam mengembangkan inovasi dan penerapan teknologi tepat guna bagi pelaku UKM.

6. Ekspansi Pasar Internasional

Kerangka kebijakan Kota Batu pada akses pasar internasional, terdapat dimensi kebijakan terdiri dari program promosi ekspor, memberikan saran dan nilai yang tinggi informasi dari pasar internasional, program peningkatan kapasitas ekspor, dan fasilitas keuangan bagi UKM untuk ekspor. Pemasaran internasional penting dalam mengembangkan UKM agar dapat meluaskan pangsa pasarnya. Pemasaran Internasional menurut Jain (2001:15) merupakan pemasaran yang mengacu pada pertukaran melintasi batas-batas negara untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan manusia.

Kerangka kebijakan untuk meningkatkan akses pasar internasional untuk produk Kota Batu, termasuk yang dihasilkan oleh UKM cukup berkembang dengan baik. Ada berbagai program promosi ekspor yang memadai didanai dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu. Pemerintah Kota Batu mempunyai program khusus yaitu pameran internasional untuk mempromosikan produk hasil UKM Kota Batu. Pemerintah, melalui berbagai lembaga, juga menyediakan informasi tentang pasar ekspor tertentu, termasuk fitur produk, harga, pembeli, standar yang relevan dan spesifikasi, dan persyaratan hukum dan prosedur yang terkait. Namun pada sistem intensif, Pemerintah Kota Batu belum memiliki kerjasama dengan Badan – Badan seperti Bea Cukai untuk pengurangan biaya bagi pelaku UKM yang melakukan aktivitas ekspor.

Pemerintah Kota Batu juga telah memberikan dukungan keuangan bagi UKM untuk ekspor. Berdasarkan informasi untuk pelaku UKM yang melakukan ekspor juga disediakan kemudahan dalam akses finansial ke lembaga keuangan. Kemudian Pemerintah memberi fasilitas pelatihan bagi pelaku UKM yang melakukan ekspor. Pelatihan ini dibuat untuk mempermudah pelaku UKM dalam mengenal pasar internasional.

7. Pelatihan Kewirausahaan

Kinerja Pemerintah Kota Batu dalam pendidikan kewirausahaan sudah cukup baik di hampir semua aspek dimensi kebijakan.

Sementara pemerintah, bersama-sama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi, telah mengembangkan dan menawarkan sistem jaminan kualitas dan serta untuk UKM dan kewirausahaan. Pemerintah Kota Batu juga telah bekerja sama dengan universitas dan sektor swasta dan mendukung program pelatihan kewirausahaan, kurikulum, penelitian, dan pembinaan. Selanjutnya, informasi tentang program pelatihan bagi pelaku UKM mudah untuk diakses, semua informasi dapat di akses oleh pelaku UKM dengan melihat jadwal di *website* PLUT.

Sistem dan jaminan dalam pelatihan kewirausahaan sudah menjadi sebuah aturan dalam mengembangkan UKM agar kualitas untuk UKM dan kewirausahaan dapat dikembangkan sehingga banyak masyarakat yang dapat memulai bisnis sendiri. Sehingga Pemerintah Kota Batu selalu melakukan pelatihan kepada sumber daya manusia di Kota Batu agar memiliki *skill* dan kreativitas dalam mengembangkan kewirausahaan pada masyarakat Kota Batu. Pemerintah Indonesia telah memberikan informasi tentang penyedia pelatihan pendidikan nonformal dan manajemen UKM. Pelatihan bagi para pelaku UKM di Kota Batu sudah gratis dan terjadwal sesuai dengan jumlah sumber daya manusia yang ingin mendapatkan pelatihan kewirausahaan.

8. Representasi yang Lebih Efektif untuk Kepentingan UKM

Pemerintah Kota Batu memiliki wadah asosiasi bagi para pelaku UKM Kota Batu. Asosiasi ini adalah Asosiasi Pengusaha Kota Batu

(APKB), Asosiasi didirikan untuk memberikan wadah bagi para pelaku UKM Kota Batu untuk saling berhubungan dan berbagi pengalaman. Selain itu, Pemerintah Kota Batu digunakan untuk mendampingi para pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya.

Beberapa asosiasi juga berpartisipasi dalam memberikan pelatihan yang mendukung peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan bagi pelaku UKM. Namun demikian, asosiasi UKM masih relatif lemah, terutama dalam hal kapasitas penelitian karena tidak ada asosiasi yang memiliki sebuah departemen penelitian atau pusat penelitian kebijakan khusus untuk UKM. Asosiasi ini juga tidak dapat memberikan pemikiran dalam pengambilan kebijakan dengan Pemerintah Kota Batu terkait pengembangan UKM Kota Batu.

Berdasarkan hasil angket tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan daya saing global UKM di Kota Batu sudah berjalan cukup baik yaitu sebesar 3.87. Hal ini menurut ERIA (2008:7) dijelaskan bahwa kebijakan yang ada di Kota Batu berjalan cukup baik bagi kebutuhan UKM Kota Batu. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diartikan bahwa daya saing di Kota Batu masih rendah untuk dapat menembus pasar global namun kebijakan yang dijalankan sudah berjalan dengan baik walaupun belum efektif pada beberapa kebijakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mauregen (2012) yang berjudul *Promoting SME Development in Indonesia*, penelitian

ini mengungkapkan bahwa daya saing di Indonesia masih rendah karena intensitas ekspor UKM Indonesia yang rendah pada pasar global walaupun terdapat perubahan kebijakan yang dapat membantu untuk meningkatkan daya saing UKM. Berdasarkan hasil penelitian ini, kebijakan yang diberikan Pemerintah kepada pelaku UKM untuk pengembangan daya saing global berjalan sesuai dengan kebutuhan UKM. Namun, dalam penelitian ini kebijakan layanan dukungan yang diberikan Pemerintah Kota Batu bagi pelaku UKM belum berjalan dengan baik. Layanan Pemerintah Kota Batu pada *E-Government* masih belum ada untuk kemudahan UKM dalam mengakses informasi, sehingga Pemerintah Kota Batu perlu menambahkan layanan tersebut untuk mempermudah pelaku UKM untuk mengakses informasi dari Pemerintah.

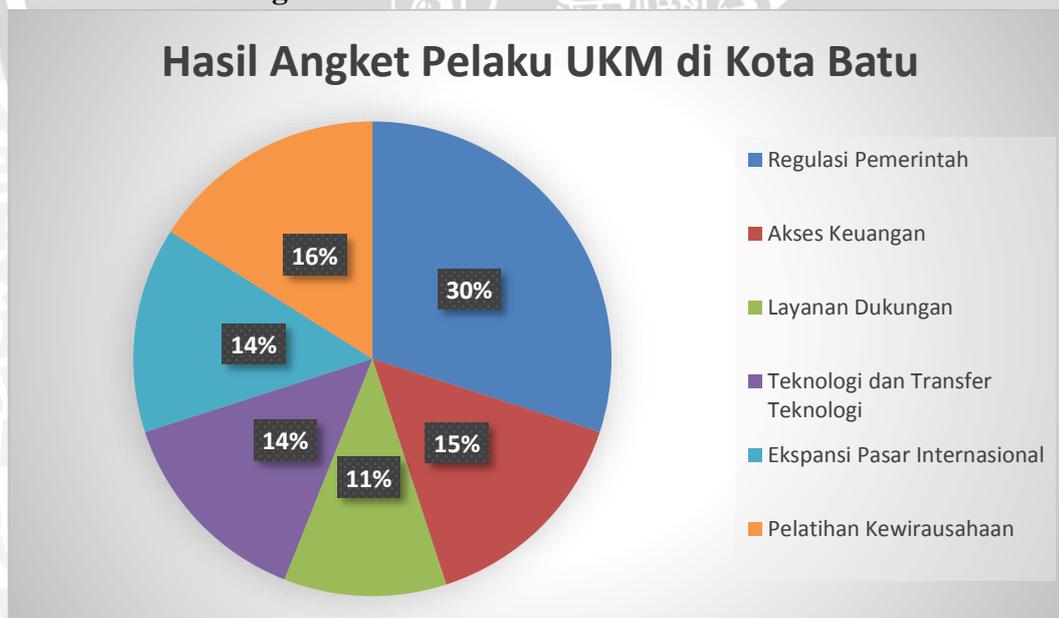
3. Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah tentang Kebijakan Pengembangan Daya Saing UKM di Kota Batu pada Pasar Global

Persepsi pelaku UKM sangat penting terhadap kebijakan pengembangan daya saing UKM di Kota Batu pada pasar global guna mengukur kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan UKM. Pelaku UKM dalam mengembangkan pasar global dengan melakukan ekspor. Ekspor adalah menjual barang dari dalam negeri ke luar peredaran Republik Indonesia (Hamdani,2012:37). Ekspor sendiri adalah cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memasuki pasar global. Pelaku UKM perlu kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah untuk melindungi

serta memfasilitasi usahanya dalam mengembangkan UKM di pasar global.

Pengembangan UKM Kota Batu dapat berjalan jika kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan bagi pengembangan UKM yaitu adanya regulasi Pemerintah yang baik, kemudahan dalam permodalan, layanan dukungan Pemerintah, teknologi dan transfer teknologi, ekspansi pasar internasional, dan pelatihan kewirausahaan (ERIA, 2008:3). Dalam mengukur persepsi pelaku UKM terhadap kebijakan, peneliti menggunakan tabel frekuensi sebagai hasil dari angket kepada pelaku UKM berorientasi ekspor. Tabel frekuensi tersebut disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Hasil Angket Pelaku UKM di Kota Batu



Sumber : Data diolah (2017)

Pada hasil angket yang peneliti bagikan kepada pelaku UKM, persepsi pelaku UKM terhadap regulasi pemerintah di Kota Batu sangat baik, yaitu sekitar 30%. Regulasi pemerintah Kota Batu yang berjalan dengan baik, cepat, dan mudah terlihat pada kemudahan prosedur pada penerbitan perizinan usaha. Kemudahan pelaku UKM memperoleh peizinan usaha dari Pemerintah memberikan dampak positif bagi pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya. Adanya peraturan bagi UKM yang efektif untuk meningkatkan daya saing memberikan pelaku UKM kesempatan untuk dapat memperbaiki kualitas, kuatitas, dan inovasi pada produk hasil UKM di Kota Batu. Inovasi yang dilakukan secara terus-menerus penting untuk meningkatkan kualitas produk serta menghasilkan produk-produk baru mengikuti perubahan selera pasar (Tambunan, 2012:70). Daya saing UKM yang meningkat mengakibatkan UKM dapat bersaing dengan produk-produk di negara lain. Regulasi Pemerintah dalam pemungutan pajak yang sesuai dengan badan usaha juga mendapatkan persepsi positif dari pelaku UKM. Pemungutan pajak sesuai skala usaha menurut Ibu Hari Mastutik pemilik Arjuna 999 memaparkan bahwa pemungutan pajak yang sesuai meringankan beban pada pengeluaran usahanya. Berdasarkan angket tersebut dapat disimpulkan bahwa regulasi pemerintah di Kota Batu sudah baik dan sesuai dengan kebutuhan UKM di Kota Batu.

Persepsi pelaku UKM pada akses keuangan untuk permodalan usaha memberikan respon yang baik. Respon dari akses keuangan sekitar 15%. Hasil dari angket memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Batu

memberikan kemudahan bagi pelaku UKM dalam prosedur peminjaman modal. Hal ini terbukti dengan pemaparan Bapak Rahman bahwa Pemerintah Kota Batu memiliki kerjasama pada lembaga keuangan seperti Bank Jatim dan Bank BRI bagi pelaku yang ingin melakukan kredit di Bank. Selain itu, peraturan atau prosedur yang mudah bagi peminjam modal juga memberikan persepsi positif pada pelaku UKM. Berdasarkan angket tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah pada akses keuangan sudah sangat membantu aktivitas pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya.

Kebijakan layanan dukungan Pemerintah Kota Batu bagi pelaku UKM memiliki persepsi yang rendah, yaitu sekitar 11%. Kebijakan ini memiliki persepsi yang rendah dari pelaku UKM dikarenakan masih belum dapat mencakup kebutuhan UKM sendiri. Pemberian wadah atau lembaga untuk hubungan antara Pemerintah dan pelaku UKM masih belum merata. Saat ini, Pemerintah Kota Batu memiliki lembaga bagi UKM adalah Asosiasi Pengusaha Kota Batu (APKB). APKB ini masih belum sesuai dengan kebutuhan UKM Kota Batu. Hal ini karena lembaga masih belum fokus dalam mendampingi usaha pelaku UKM. Layanan dukungan Pemerintah akan bantuan transfer teknologi bagi pelaku UKM juga masih belum maksimal. Rendahnya Pemerintah dalam pemberian bantuan transfer teknologi karena saat ini Pemerintah Kota Batu hanya dapat memberikan bantuan pada usaha bersama belum mencakup usaha perorangan. Namun,

dukungan Pemerintah pada peningkatan teknologi untuk produksi dan pengolahan produk memiliki persepsi yang baik dari pelaku UKM.

Kebijakan teknologi dan transfer teknologi mendapatkan persepsi dari pelaku UKM sekitar 14%. Kebijakan ini mencakup pada adanya kerjasama teknologi untuk mengembangkan *Research and Development* bagi usaha. Kemudian adanya insentif keuangan untuk pengembangan teknologi dari Pemerintah yang memberikan persepsi baik dari pelaku UKM. Adanya promosi jaringan bisnis untuk mengembangkan koneksi di pasar internasional memberikan kontribusi yang baik bagi pelaku UKM.

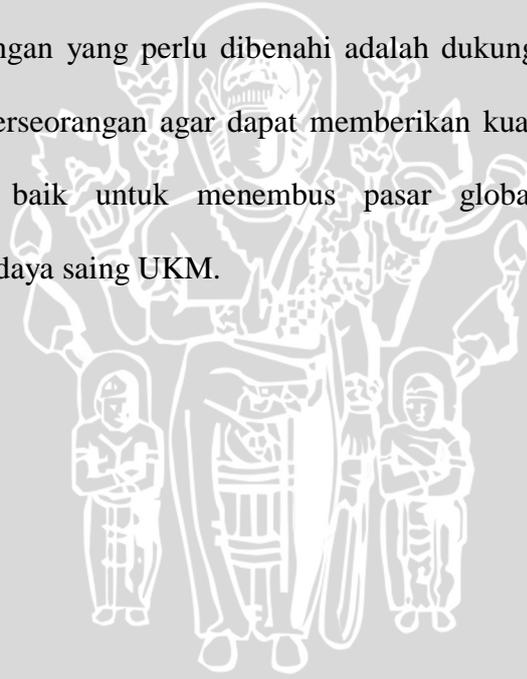
Pemerintah Kota Batu saat ini sedang meningkatkan produk UKM untuk memasuki pasar ekspor. Pelaku UKM menyambut dengan positif keinginan Pemerintah. Ekspor langsung paling banyak dilakukan oleh UKM Kota Batu. Ekspor langsung adalah perusahaan melakukan sendiri kegiatan-kegiatan ekspor ke luar negeri walaupun dalam pelaksanaan rincinya mungkin tetap perlu melibatkan perusahaan-perusahaan jasa (Kotabe dan Helsen, 2005:272). Hal ini dapat dilihat dari presentase yang diperoleh sekitar 14%. Adanya bantuan promosi produk UKM di pasar internasional, kemudahan mendapatkan informasi dalam memasuki pasar internasional, dan kemudahan finansial untuk pengembangan usaha bisnis ke pasar internasional memberikan persepsi yang bagus dari pelaku UKM. Bantuan-bantuan Pemerintah tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku UKM dalam mengembangkan daya saing. Kebijakan ekspansi

pasar internasional meningkatkan pengembangan UKM dan daya saing produk UKM di Pasar Global

Persepsi pelaku UKM terhadap adanya kebijakan pelatihan Kewirausahaan yang dikembangkan Pemerintah Kota Batu mendapatkan respon yang baik. Hasil angket peneliti menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Batu menyediakan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UKM untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adanya pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UKM memberikan dampak positif untuk pengembangan daya saing UKM. Dampak dari pelatihan ini adalah produk-produk yang berinovasi dari segi kualitas dan kuantitas, kualitas sumber daya manusia yang memiliki *skill* untuk menghasilkan produk, dan adanya peningkatan sumber daya manusia dalam menguasai teknologi modern.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dewanti (2010) yang berjudul Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro: Kendala dan Alternatif Solusinya. Penelitian Dewanti (2010) mengungkapkan bahwa kebijakan pemberdayaan UKM masih kurang efektif karena adanya kendala seperti waktu, sumber daya, sikap, jaringan, dan informasi. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian ini, yaitu hampir kebijakan yang dicanangkan Pemerintah Kota Batu sudah cukup efektif dalam pengembangan UKM seperti informasi dapat diperoleh pelaku UKM menggunakan *website* PLUT sehingga menghemat waktu dalam mendapatkan informasi.

Berdasarkan hasil dari angket untuk pelaku UKM di Kota Batu dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa persepsi pelaku UKM terhadap kebijakan pengembangan daya saing UKM Kota Batu pada pasar global sangat baik sebesar 30%. Hampir pada semua kebijakan yang dicanangkan Pemerintah memiliki persepsi yang tinggi dari pelaku UKM Kota Batu. Namun, pada kebijakan layanan dukungan dari Pemerintah Kota Batu masih belum memadai untuk kebutuhan usaha yaitu 11%, sehingga perlu adanya peningkatan pada layanan Pemerintah kepada UKM di Kota Batu. Layanan dukungan yang perlu dibenahi adalah dukungan teknologi bagi usaha UKM perseorangan agar dapat memberikan kualitas dan kuantitas produk yang baik untuk menembus pasar global sehingga akan meningkatkan daya saing UKM.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dari setiap pembahasannya yaitu:

- 1) Kontribusi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berorientasi Ekspor terhadap Ekonomi Lokal di Kota Batu:
 - a. UKM berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja di Kota Batu;
 - b. UKM berkontribusi meningkatkan pendapatan masyarakat di Kota Batu;
 - c. UKM berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Batu;
 - d. UKM berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Batu;
 - e. UKM berkontribusi dalam meningkatkan produk-produk yang diekspor ke negara lain karena produk yang dihasilkan beragam dan berinovasi.
- 2) Implementasi Kebijakan Pengembangan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Batu dalam Mengembangkan Daya Saing Pada Pasar Global
 - a. Kerangka Kelembagaan, adanya dukungan Pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah formal atau informal memfasilitasi konsultasi atau memberikan arahan yang sesuai dengan kebutuhan UKM Kota Batu, dan kerjasama Pemerintah dengan BAPPENAS dalam mengevaluasi strategi untuk pengembangan daya saing UKM di Kota Batu.

- b. Layanan Dukungan, adanya strategi untuk pengembangan daya saing UKM di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu memberikan pelayanan terpadu dalam memfasilitasi UKM untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah Kota Batu masih kurang memenuhi kebutuhan layanan UKM dalam hal *E-Government*.
- c. Layanan Cepat dan Murah bagi Pelaku *Start-up* dan Perbaikan Regulasi. Perbaikan pelayanan proses pendaftaran bisnis dan start-up di Kota Batu sudah menjadi cepat dan murah. Pemerintah Kota Batu Pemerintah Indonesia telah memiliki *one-stop-shop*. Pemerintah belum mempunyai peraturan khusus bagi UKM di Kota Batu.
- d. Akses Keuangan. Pemerintah Kota Batu sudah mempermudah peminjaman bagi UKM Kota Batu. Ada peraturan yang menjamin hak-hak kreditur dan prosedur hukum bagi pemimjam. Pemerintah Kota Batu memiliki kerjasama dengan bank – bank besar untuk proses permodalan bagi pelaku UKM seperti Bank Jatim dan Bank BRI.
- e. Teknologi dan Transfer Teknologi. Pemerintah Kota Batu memberikan bantuan berupa sertifikasi usaha bagi pelaku UKM Kota Batu. Pemerintah Kota Batu juga memberikan pendampingan pada UKM untuk mengembangkan sistem keuangannya yang professional. Namun, Pemerintah Kota Batu belum dapat memenuhi kebutuhan UKM untuk berbasis riset.
- f. Ekspansi Pasar Internasional. Pemerintah Kota Batu mempunyai program khusus yaitu pameran internasional untuk mempromosikan produk hasil UKM Kota Batu. Pemerintah juga menyediakan informasi tentang pasar ekspor. Namun, Pemerintah Kota Batu belum memiliki kerjasama dengan Badan –

Badan seperti Bea Cukai. Pemerintah Kota Batu juga telah memberikan dukungan keuangan bagi UKM untuk ekspor.

g. Pelatihan Kewirausahaan. Pemerintah Kota Batu telah mengembangkan dan menawarkan sistem jaminan kualitas dan serta untuk UKM dan kewirausahaan.

Pemerintah Kota Batu juga telah bekerja sama dengan universitas dan sektor swasta dan mendukung program pelatihan kewirausahaan, kurikulum, penelitian, dan pembinaan.

h. Representasi yang Lebih Efektif untuk Kepentingan UKM. Pemerintah Kota Batu memiliki wadah asosiasi bagi para pelaku UKM Kota Batu yaitu Asosiasi Pengusaha Kota Batu (APKB).

3) Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah Tentang Kebijakan Pengembangan Daya Saing UKM di Kota Batu Pada Pasar Global

Presepsi pelaku UKM terhadap kebijakan pengembangan daya saing UKM Kota Batu pada pasar global sangat baik. Hampir pada semua kebijakan yang dicanangkan Pemerintah memiliki persepsi yang tinggi dari pelaku UKM Kota Batu. Namun, pada kebijakan layanan dukungan dari Pemerintah Kota Batu masih belum memadai untuk kebutuhan usaha.

B. Saran

Dari pembahasan di atas terdapat beberapa hal yang dapat disarankan pada Pemerintah Kota Batu dalam pengembangan daya saing global UKM di Kota Batu, antara lain:

- 1) Kontribusi UKM di Kota Batu memberikan peningkatan pada pendapatan daerah namun pertumbuhan ekonomi Kota Batu menurun sehingga Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada pelaku UKM. Hal ini perlu dilakukan karena pelaku UKM dapat membantu pemerataan pendapatan masyarakat di Kota Batu sehingga hasilnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Batu.
- 2) Pemerintah Kota Batu perlu meningkatkan kemudahan layanan pada sistem *online* agar para pelaku UKM dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Sistem layanan *online* ini dapat digunakan pelaku UKM Kota Batu untuk meningkatkan pengembangan UKM dari segi teknologi.
- 3) Pemerintah Kota Batu perlu membuat pembaharuan pada lembaga UKM di Kota Batu. Adanya lembaga membantu UKM Kota Batu untuk memberikan fasilitas dalam mendapatkan wadah hubungan antara pelaku UKM dengan Pemerintah.
- 4) Pemerintah Kota Batu perlu memerikan bantuan layanan dukungan teknologi bagi usaha UKM yang dimiliki perseorangan, Hal ini perlu dilakukan guna membantu usaha yang dimiliki perseorangan dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas produk yang dihasilkan sehingga akan memberikan peningkatan daya saing UKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Tri Siwi. 2015. *Kewirausahaan Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ajami, Riad A, Karel Cool, G. Jason, and Dara Khambata. 2006. *International Business Theory and Practice*. Second Edition. USA : M. E. Sharpe, Inc
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. *Pengertian UKM*. Diakses dari www.bps.go.id pada tanggal 09 Desember 2016.
- Ball, Donald A, , J. Michael Geringer, Michael S. Minor, dan Jeanne M. Mcnett. 2014. *Bisnis Internasional*. Terjemahan oleh Ika Akbarwati dan Heni Fauziah. Edisi 12 Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.
- Bank Indonesia. *Profil Bisnis UMKM*. Diakses dari www.bi.go.id pada tanggal 09 Desember 2016.
- Bangsawan, Satria. 2015. *Manajemen Pemasaran Usaha Kecil*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Cateora, Philip R. and Graham, J.L. 2002. *Internasional Marketing*. New York : The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Canon, Joseph P., William D. Perreault, dan E. Jerome McCarthy. 2008. *Dasar Pemasaran - Pendekatan Manajemen Global*. Terjemahan Diana Angelica dan Ria Cahyani. Jakarta : Salemba Empat.
- Dewanti , Ida Susi. 2010. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro : Kendala dan Alternatif Solusinya. *Jurnal Administrasi Bisnis* Volume 6 No. 2 Halaman 1. Yogyakarta.
- Diskoperindag, 2017. *Data – data Usaha Kecil dan Menengah di Kota Batu*. Kota Batu.
- Djamhari, Choirul. 2004. Orientasi Pengembangan Agroindustri Skala Kecil dan Menengah. *Infokop* Nomor 25.
- ERIA. 2008. *ASEAN SME Policy Index 2014: Towards Competitive And Innovative ASEAN SMES*. Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia.
- Fithriyati, Hanna. 2013. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia. *Jurnal Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi* Volume X No. 1 Halaman 55. Mataram

- Fitriati, Rachma. 2015. *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif: Sebuah Riset Tindakan Berbasis Soft Systems Methodology*. Jakarta: Obor.
- Hamdani. 2012. *Ekspor-Impor Tingkat Dasar*. Jakarta: Bushindo.
- Hill, Charles W.L. 2008. *International Business Competing in the Global Marketplace*. Terjemahan Catur Sugiarto dan Ratna Sarsati. Jakarta : Salemba Empat
- Jain, Subhash C.2001. *Manajemen Pemasaran Internasional*. Alih Bahasa Imam Nurmawan SE. Edisi ke 5 Jilid 1. Jakarta : Erlangga.
- Katsioloudes, Marios I. and Spyros Hadjidakis. 2007. *International Business: A Global Prepective*. Oxford, UK : Elsevier Inc.
- Koran Surya. 2016. *Penggiat UMKM Meningkat di Kota Batu*.
- Kotabe, Massaki and Kristiaan Helsen. 2004. *Global Marketing Management*. USA: John Wileyand Sons, Inc.
- _____. 2005. *Global Marketing Management*. USA: John Wileyand Sons, Inc.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran*, Edisi Ketiga Belas Jilid 2, Terjemahan Bob Sabran. Jakarta: Erlangga.
- Miles, Mathew B.A dan Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J.2007. *Metode Penelitian Kulitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mourougane, Annabelle. 2012. Promoting SME development in Indonesia. OECD Economics Department Working. *Papers*, No. 995. OECD Publishing.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. 2008. *Pemberdayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta.
- Saiman, Leonardus. 2014. *Kewirausahaan : Teori, Praktik dan Kasus-Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudaryanto. 2011. The Need for ICT-Education for Manager or Agribusinessman to Increasing Farm Income : Study of Factor Influences on Computer Adoption in East Java Farm Agribusiness. *International Journal of Education and Development, JEDICT*, Vol 7 No 1. Jember

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfa Beta.

Tambunan, Tulus. 2008. *SME Development In Indonesia: Do Economic Growth And Government Supports Matter?.* Jakarta: Universitas Indonesia.

_____. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-Isu Penting*. Jakarta : LP3ES.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

